



LAPORAN PENELITIAN

Wacana Ahmadiyah di Media Massa

(Analisis Wacana Pemberitaan Harian *Suara Merdeka*
dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia
di Cikeusik, Pandeglang, Banten)

Oleh:

Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.

Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Diponegoro

Tahun Anggaran 2011

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

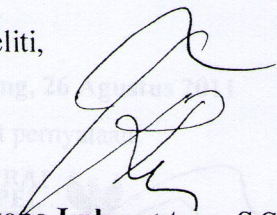
2011

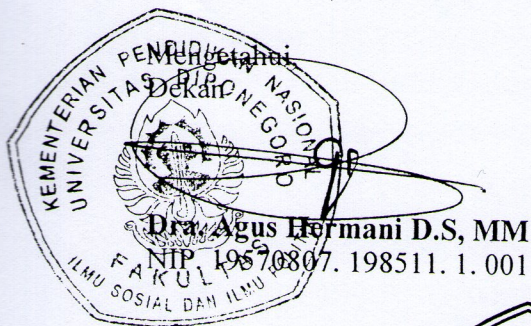
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Wacana Ahmadiyah di Media Massa**
(Analisis Wacana Pemberitaan Harian *Suara Merdeka* dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten)
2. Peneliti
Nama : Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 19701211.199802.1.001
Jabatan Struktural : IIIA
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Fak/ Jurusan : ISIP / Ilmu Komunikasi
Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro
Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No.1 Tembalang Semarang
Telp/ Fax : (024) 7465408
Alamat Rumah : Jl. Murti Alamanda Raya No. 27 Perumahan Muktiharjo Indah Semarang
3. Lokasi Penelitian : Semarang
4. Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 3.684.211,00
6. Sumber Dana : Dana DIPA FISIP UNDIP tahun anggaran 2011

Semarang, 26 Agustus 2011

Peneliti,


Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.
NIP. 19701211.199802.1.001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.
NIP : 19701211.199802.1.001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang disusun dengan judul: **Wacana Ahmadiyah di Media Massa** (Analisis Wacana Pemberitaan Harian *Suara Merdeka* dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten),

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 26 Agustus 2011

Pembuat pernyataan



Triyono Lukmantoro, S.Sos., M.Si.

19701211.199802.1.001

KATA PENGANTAR

Penelitian ini diberi judul “Wacana Ahmadiyah di Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian *Suara Merdeka* dalam Kasus Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten). Konteks penelitian ini ialah pemberitaan *Suara Merdeka* terhadap peristiwa penyerbuan yang dialami oleh kalangan pengikut Ahmadiyah di daerah Cikeusik. Kejadian itu mengakibatkan beberapa orang terluka dan beberapa orang lain bahkan tewas secara mengenaskan. Sorotan pun diberikan oleh berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah maupun di luar pemerintah, untuk mengomentari peristiwa itu.

Secara lebih detail, penelitian ini disajikan ke dalam empat bab. Pada bab pertama, disajikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, perspektif teoretis, serta metode analisis wacana menurut Teun A. van Dijk. Pada bab kedua, dipaparkan tentang hasil penelitian mengikuti skema pemberitaan yang dikemukakan van Dijk. Urut-urutan skema pemberitaan tersebut ialah judul berita, subjudul berita, teras berita, reaksi-reaksi verbal yang dikemukakan oleh para narasumber berita, peristiwa utama, konsekuensi, komentar-komentar, dan latar belakang.

Pada bab ketiga, diuraikan analisis terhadap temuan penelitian yang merujuk pada gagasan van Dijk tentang struktur ideologis yang terdapat pada pemberitaan itu. Struktur ideologis itu berisi keanggotaan, aktivitas-aktivitas, tujuan-tujuan, norma-norma, relasi-relasi, dan sumber-sumber. Pada analisis tersebut dapat disimak bahwa kelompok Ahmadiyah berada dalam posisi yang disudutkan. Sementara itu, pihak yang melakukan penyerangan justru secara implisit mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar struktur negara.

Dalam bab keempat, ditampilkan tentang penutup yang memuat kesimpulan. Secara tegas dapat dikemukakan bahwa pihak Ahmadiyah dan pendukungnya hanya memperoleh akses pemberitaan yang begitu minimal. Sebaliknya, pihak pemerintah dan organisasi-organisasi di luar struktur negara yang memojokkan Ahmadiyah justru mendapatkan akses yang sangat besar untuk mengemukakan kecaman dan perasaan kebencian terhadap Ahmadiyah.

ABSTRAK

Peristiwa penyerbuan massa terhadap kalangan pengikut Ahmadiyah di daerah Cikeusik, Pandeglang, Banten, mendapatkan perhatian yang besar dari media massa. Hal ini disebabkan kejadian itu melahirkan banyak korban, baik korban yang terluka parah maupun tewas. *Suara Merdeka* juga menyajikan pemberitaan terhadap kejadian itu dalam serial pemberitaan yang boleh dikatakan panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang skema pemberitaan *Suara Merdeka* terhadap peristiwa tersebut dan menguraikan struktur wacana ideologis yang terdapat dalam pemberitaan-pemberitaan harian tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari aspek judul berita, teras berita, dan reaksi-reaksi verbal yang dikemukakan oleh para narasumber, maka *Suara Merdeka* memberikan penegasan bahwa kelompok Ahmadiyah layak dilihat sebagai sekumpulan manusia yang mengikuti ajaran agama yang sesat. Hal ini dapat terjadi karena harian ini memberi akses yang begitu besar kepada pihak pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Suryadharma Ali) dan organisasi-organisasi keagamaan di luar pemerintah; misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI); dan beberapa individu lainnya yang secara terbuka menyatakan bahwa Ahmadiyah melakukan kesesatan dalam beragama. Sebaliknya, kelompok Ahmadiyah dan kalangan pendukungnya diberikan akses yang sangat kecil untuk berbicara atau mengemukakan pendapat mereka.

Dalam situasi semacam itu, maka hal yang dapat dikonklusikan adalah *Suara Merdeka* telah menjadi apparatus ideologis bagi kelompok keagamaan dominan. Pada akhirnya, secara implisit, harian ini memberikan pembenaran atau legitimasi bahwa kekerasan yang dialami para pengikut Ahmadiyah merupakan hal yang pantas atau selayaknya terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* terlibat secara kuat dalam memposisikan kalangan pengikut Ahmadiyah sebagai kaum beragama minoritas. Prasangka (sikap dan pemikiran yang demikian negatif) dan diskriminasi (dalam bentuk kekerasan dan penerapan hukum yang merugikan) kalangan pengikut Ahmadiyah dianggap sebagai kewajiban belaka.

ABSTRACT

The event of attacking Ahmadiyah followers on Cikeusik, Pandeglang, Banten, became big news for mass media. Many people died and many other wounded in that event. *Suara Merdeka* Daily has reported the event too. The purposes of this research are describing news schema of the event and explaining the ideological discourse structure of *Suara Merdeka* news.

The results of this research show that headlines, leads, and verbal reactions of the sources affirm that Ahmadiyah appropriate to be classified as a group of people that follow deviant religion doctrines. That is because of *Suara Merdeka* give more access for official sources, for example the Minister of Religion and other civil organizations, that declared that Ahmadiyah did heresy in Islam religion.

It is concluded that *Suara Merdeka* has become as an ideological apparatus for the dominant religion groups. Moreover, implicitly, *Suara Merdeka* has given a justification and a legitimation that violence suffered by Ahmadiyah was proper action. This indicated that *Suara Merdeka* posited Ahmadiyah followers as the minority people. Prejudice and discrimination for Ahmadiyah was viewed by *Suara Merdeka* as suitable policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Kontribusi penelitian	5
E. Kerangka pemikiran teoritik	5
F. Metoda penelitian	9
 BAB II SKEMA PEMBERITAAN PENYERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI CIKEUSIK, PANDEGLANG, BANTEN	
A. Dialog untuk membahas sumber pembuat kekerasan	13
B. Reaksi penolakan Ahmadiyah.....	21
 BAB III STRUKTUR WACANA IDEOLOGIS AHMADIYAH SEBAGAI AJARAN KELOMPOK YANG SESAT	
A. Keanggotaan: Siapakah kami	33
B. Aktivitas-Aktivitas: Apa yang kami lakukan?.....	33
C. Tujuan-tujuan: Mengapa kami melakukan hal ini?	34
D. Norma-norma: Apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan?	34
E. Relasi-relasi: Siapa sajakah teman atau musuh kami?	35
F. Sumber-sumber: Apa yang kami miliki dan pihak lain tidak memilikinya?	35
 BAB IV PENUTUP	
36	
 DAFTAR PUSTAKA	
37	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

”Jangan biarkan negeri ini menjadi tanah petualangan, kemurkaan, dan kebencian tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya pada Perayaan Dharma Shanti Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933, di Jakarta.¹ Pernyataan SBY itu merupakan tanggapannya terhadap berbagai aksi teror yang memakai bom buku yang pernah terjadi di beberapa tempat di Jakarta, pada pertengahan Maret 2011. Hanya saja, diksi “kemurkaan” dan “kebencian” itu menjadi amat layak untuk digarisbawahi tidak hanya terkait dengan peristiwa teror yang menggunakan bom buku, melainkan juga dalam kehidupan antarumat beragama.

Hal ini disebabkan kemurkaan dan kebencian tersebut juga mudah menimpa kelompok beragama minoritas. Penyerangan terhadap kalangan pengikut Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada 6 Februari 2011, adalah bukti yang paling nyata. Persoalan yang lebih memprihatinkan lagi adalah di sejumlah provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, diterbitkan peraturan daerah yang semakin mempersempit ruang gerak para pengikut Ahmadiyah. Dalih yang digunakan adalah peraturan daerah itu merupakan operasionalisasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang berada pada level pusat (nasional).²

Kekerasan yang beberapa kali diarahkan terhadap para pengikut Ahmadiyah itu merupakan fenomena yang disebut sebagai *hate crime*. Hal ini terjadi karena kekerasan tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan berjalan secara sistematis. Secara harfiah, *hate crime* berarti kejahatan sebagai akibat rasa kebencian. Namun, secara konseptual, *hate crime* bukan tindakan kriminalitas yang dilandaskan pada kebencian atau ketidaksukaan yang bersifat spontan belaka. *Hate crime* adalah aksi kriminal yang dijalankan segolongan orang dengan dalih menegakkan kebenaran.

¹ “SBY: Petualangan Kebencian Tak Boleh Tumbuh Subur”, *Seputar Indonesia* edisi 22 Maret 2011.

² Lihat “Demam Daerah Melarang Ahmadiyah”, *Majalah Tempo* edisi 7 Maret 2011.

Hate crime, sebagaimana diuraikan oleh Eugene McLaughlin,³ adalah tindak kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian, bias maupun prasangka terhadap seseorang atau properti yang didasarkan pada ras, etnisitas, jender, agama, atau orientasi seksual dari pihak korbannya. Kebencian itu bisa jadi bersifat aktual maupun dipersepsikan belaka. Para pelaku *hate crime* selalu melandaskan pada identitas yang terdapat pada korban-korbannya. Terdapat proses seleksi yang dijalankan secara intensional (penuh kesengajaan) kepada para korban dengan alasan perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Jadi, *hate crime* memang kejahatan yang lahir dari watak tidak mengenal toleransi.

Biasanya kalangan korban yang menjadi sasaran *hate crime* adalah kelompok-kelompok minoritas. Apa yang disebut sebagai kelompok minoritas bukan didasarkan pada jumlah penduduk secara kuantitatif. Minoritas adalah siapa pun yang mendapat prasangka (pandangan dan sikap negatif) dan perlakuan diskriminatif (ketidakadilan) yang dilakukan kelompok dominan.⁴ Jika secara kebetulan kelompok minoritas itu dari aspek jumlah memang sangat sedikit, maka aksi-aksi *hate crime* makin gampang dijalankan. Hal ini merujuk kepada dalih strategis bahwa jumlah yang sedikit memang layak dihukum maupun dibasmi dan sedikit kemungkinan mendapatkan pembelaan.

Hate crime sangat mudah menghantam masyarakat yang plural (majemuk) karena para pelakunya selalu berupaya mencari-cari perbedaan identitas. Masalahnya bukan hanya perbedaan identitas itu sendiri yang kemudian meluapkan aksi-aksi *hate crime*, namun melainkan perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Dalam kajian sosiologi, penyimpangan (*deviance*) merupakan realitas yang bersifat relatif. Penyimpangan tergantung kepada siapa yang memberikan penafsiran atau penilaian terhadap perilaku tertentu. Penyimpangan bisa pula mencuat karena kriteria yang diharapkan kelompok dominan tidak mampu dipenuhi kaum minoritas.⁵

³ Lihat Eugene McLaughlin dan John Muncie (eds.), *The Sage Dictionary of Criminology* (New Delhi: Sage Publications, 2001), hal. 136.

⁴ Dalam kajian sosiologi, biasanya kelompok minoritas merujuk pada ras dan etnisitas. Hal ini disebabkan minoritas selalu dikaitkan dengan keunikan fisik dan karakteristik-karakteristik kultural yang menyertainya. Lihat, misalnya, Alex Thio, *Sociology: An Introduction, Second Edition* (Sydney: Harper & Row Publishers, 1989), hal. 237-241. Dalam konteks yang lebih luas, minoritas dapat juga dikaitkan dengan keberadaan kelompok beragama yang lazimnya memiliki pengikut dalam jumlah yang kecil. Karena jumlah mereka yang kecil itu, maka kelompok beragama ini mendapatkan prasangka dan diskriminasi dari kelompok beragama dominan.

⁵ George D. Zgourides dan Christie S. Zgourides, *Sociology* (New York: IDG Books Worldwide, 2000), hal. 69-73.

Dari kriteria penilaian yang selalu membuka kesenjangan itulah, aksi-aksi *hate crime* menimpa kaum minoritas. Kelompok minoritas homoseksual, yang tidak sesuai dengan harapan dan penilaian mayoritas heteroseksual, dituding sebagai kaum yang menyalahi kodrat alamiah manusia. Kelompok minoritas berbasis etnisitas sangat bisa dikucilkan dan mendapat kekerasan berulang kali karena dianggap serakah menguasai sumberdaya ekonomi. Kelompok minoritas berlandaskan keagamaan bisa dituding melakukan ketersesatan karena ajaran dan ritual peribadatannya dianggap menerabas kebenaran. Semua fenomena itu menunjukkan *hate crime* terlontar dari penciptaan batas-batas norma yang dianggap lazim (*ordinary*) versus tidak lazim (*extraordinary*).

Gejala secara umum yang dapat diamati adalah *hate crime* meraih gelombang pasang naik ketika krisis ekonomi tidak bisa segera diatasi. Kesenjangan antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin terus-menerus menganga. Angka pengangguran semakin menanjak tinggi. Ketidakpastian untuk menjangkau taraf hidup yang lebih baik tidak segera mampu ditanggulangi. Di titik itulah *hate crime* sengaja dilontarkan untuk melampiaskan perasaan kecewa yang sulit terobati. Kaum minoritas sebagai target *hate crime* memang menjadi obyek kekerasan yang paling mungkin. Hal itulah yang disebut pengambinghitaman (*scapegoating*) yang terjadi secara sistematis.⁶

Negara memang cenderung membiarkan kekerasan beraroma *hate crime* itu. Hal ini dikarenakan negara justru mendapat keuntungan karena dua alasan. Pertama, *hate crime* bisa menyelubungi negara yang tidak becus mengatasi persoalan ekonomi. *Hate crime*, dari perspektif negara, bukan karena kesalahan negara, melainkan akibat konflik horisontal dalam masyarakat. Kedua, *hate crime* dipandang sebagai pertikaian yang melibatkan kelompok-kelompok sosial berbasis identitas. Padahal, persoalan yang terjadi dalam *hate crime* sangat menunjukkan perpaduan antara masalah kelas sosial (kesenjangan ekonomi) dengan identitas sosial (keragaman kultural).

Salah satu sumber yang menyuburkan *hate crime* adalah media massa.⁷ Hal ini bertumpu pada asumsi bahwa media merupakan agen sosialisasi. Media mempunyai

⁶ Kathy S. Stolley, *The Basics of Sociology* (London: Greenwood Press, 2005), hal. 142.

⁷ Dua sumber lain yang menjadikan *hate crime* meluas adalah: Pertama, situasi psikologi individu. Kalangan pelaku *hate crime* pada umumnya mempunyai kepribadian otoriter. Secara tegas dapat dikemukakan bahwa para pelaku *hate crime* muncul sebagai kawanan *bigot* yang memiliki perasaan, pandangan, dan keyakinan bahwa mereka dianugerahi daya superioritas yang tidak tertandingkan dibandingkan kaum minoritas. Apa pun yang berkaitan dengan superioritas mereka pasti diterima sebagai keniscayaan yang tidak terbantahkan. Sebaliknya, apa pun yang bertentangan dengan superioritas mereka harus dilenyapkan. Perbedaan sekecil apa pun dipandang sebagai ancaman yang layak untuk dimusnahkan.

kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan terhadap setiap individu. Dengan kata lain, mengikuti pendapat Schaefer, media bisa meningkatkan kesatuan sosial dengan cara menghadirkan pandangan umum yang kurang atau lebih telah distandarisasikan. Dalam posisi itu, media juga menjadi penegak norma-norma sosial. Media acapkali menegaskan kembali perilaku yang dianggap pantas dengan cara menampilkan pihak-pihak tertentu yang bertindak melanggar harapan-harapan sosial.⁸

Contoh konkret yang bisa disimak pada sosialisasi *hate crime* yang dilakukan media adalah kalangan pemuka agama⁹ dan pejabat pemerintah secara berulang-ulang berbicara di depan massa bahwa meski para pengikut Ahmadiyah adalah sesat, namun jangan dilukai. Kita (kaum dominan) harus mengajak mereka bertobat. Pernyataan ini seakan-akan menunjukkan toleransi, padahal disadari atau tidak, pernyataan itu membuka peluang munculnya *hate crime*.

B. Perumusan masalah

Pemberitaan media massa tentang kasus penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah telah menyebar sedemikian luas dalam masyarakat. Salah satu isu atau wacana yang terdapat dalam berbagai pemberitaan tersebut adalah *hate crime*. Tapi, wacana *hate crime* itu tidak pernah dikemukakan secara eksplisit oleh pihak media. Pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana media merepresentasikan kasus penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah? Struktur wacana ideologis seperti apa yang terdapat dalam pemberitaan media dalam kasus penyerangan terhadap kalangan pengikut Ahmadiyah?

Kedua, kebijakan negara. Kekuasaan negara merupakan aspek yang paling signifikan dalam berbagai peristiwa *hate crime* yang terjadi secara berulang-ulang. Gejala ini dapat dilihat ketika aparat keamanan cenderung menjalankan pembiaran terhadap kaum minoritas yang menjadi korban-korban *hate crime*. Perlindungan yang seharusnya diberikan negara kepada siapa pun tidak pernah dijalankan negara secara maksimal. Aparat keamanan negara seakan-akan tidak berdaya membendung amuk massa yang merusak dan membantai kalangan korban. Tidak hanya itu, negara pun sebenarnya melegitimasi terjadinya *hate crime* melalui tatanan hukumnya sendiri. Hal ini dapat dicermati dari bagaimana negara memperlakukan kaum minoritas sebagai sekelompok orang yang harus disingkirkan karena dipandang melakukan penistaan terhadap keyakinan yang dianggap sah oleh pihak negara.

⁸ Richard T. Schaefer, *Sociology: Tenth Edition* (Toronto: McGraw Hill, 2007), hal. 137-138.

⁹ Baca, misalnya, pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj yang mengecam tindakan kekerasan terhadap para pengikut Ahmadiyah. Menurutnya, Ahmadiyah memang menyimpang, namun NU tidak akan menolerir penghakiman atas nama agama dengan cara kekerasan. Selengkapnya lihat “NU: Ahmadiyah Menyimpang, Tapi Tak Boleh Dikerasi”, *Tempo Interaktif* edisi 27 Maret 2011, 14:44 WIB.

C. Tujuan penelitian

1. Memberikan deskripsi tentang skema pemberitaan Harian *Suara Merdeka* dalam kasus penyerangan yang dialami kalangan pengikut Ahmadiyah.
2. Menguraikan struktur wacana ideologis yang terdapat dalam pemberitaan kasus penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah.

D. Kontribusi penelitian

1. Kontribusi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara akademis dalam ruang lingkup kajian media yang berkaitan dengan representasi kaum beragama minoritas dalam pemberitaan media.

2. Kontribusi praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan secara praktis kepada kalangan jurnalis dalam melakukan liputan terhadap kelompok beragama minoritas.

3. Kontribusi sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pihak masyarakat tentang pola-pola pemberitaan yang menyoroti keberadaan kelompok beragama minoritas.

E. Kerangka pemikiran teoretis

Wacana tidak sekadar dapat dimengerti sebagai sekelompok ujaran atau pernyataan yang bebas dari berbagai kepentingan. Lebih tepat lagi, sebagaimana dikemukakan Foucault, wacana merupakan praktik-praktik yang diregulasikan yang menyebabkan sejumlah pernyataan dapat atau boleh dihadirkan. Hal ini berarti bahwa wacana adalah serangkaian aturan-aturan dan prosedur-prosedur bagi kemunculan wacana tertentu. Konsekuensinya adalah wacana berisi serangkaian pernyataan sanksi (hukuman atau larangan) yang memiliki kekuatan untuk dilembagakan, yang pada akhirnya memiliki pengaruh yang mendalam terhadap tindakan dan pemikiran secara individual.¹⁰ Dalam rumusan yang lebih ringkas, wacana adalah serangkaian regulasi

¹⁰ Gagasan mengenai wacana Foucauldian ini diuraikan Sara Mills, *Discourse* (London dan New York: Routledge, 1997), hal. 62.

yang menjadikan suatu sistem pernyataan atau ujaran menjadi memungkinkan untuk diberlakukan, dipraktikkan, serta wajib ditaati dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pemberitaan-pemberitaan yang ditampilkan oleh media massa.

Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam wacana itu sendiri terdapat sejumlah aturan dan prosedur yang harus dipenuhi, maka wacana dapat berperan layaknya mesin sortir yang melakukan inklusi (pelibatan) maupun eksklusi (penyingkiran) terhadap pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh seseorang. Dalam kaitan ini, Foucault secara garis besar mengemukakan tiga aturan yang menjadikan terbentuknya suatu wacana, yakni: Pertama, obyek wacana apa yang dapat dibicarakan. Kedua, siapa atau pihak mana yang diizinkan untuk berbicara. Ketiga, konsep-konsep atau teori-teori apa yang diterima sebagai pengetahuan dalam wacana itu.¹¹ Dengan sangat konkret ketiga mekanisme pengaturan wacana ini, entah dengan sadar atau tidak, secara terus-menerus dijaga, diawetkan, serta dilestarikan oleh media massa. Sehingga mekanisme kerja media yang membentuk rutinitas dan birokratisasi secara internal pada lembaga media itu telah diterima sebagai kepastian yang tidak bisa dibantah. Artinya adalah para pekerja media menghasilkan berita dan berbagai tulisan sebagai wacana, dan serentak dengan itu pula wacana itu sendiri pada akhirnya mengatur atau mengendalikan secara total kesadaran mereka.

Melalui mekanisme prosedural pembentukan wacana ini selayaknya media massa tidak lagi dipandang secara naif sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang mampu mencerminkan atau merefleksikan realitas sosial secara jernih dan transparan. Media massa pun tidak dapat disederhanakan, sebagaimana halnya kalangan Marxis ortodoks berpikir, sebagai instrumen dari pihak yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya melalui sekian produksi ideologi sebagai kesadaran palsu. Dalam kasus ini, media massa lebih tepat dipandang sebagai pihak yang melakukan pendefinisian terhadap realitas sosial (*definers of social reality*). Artinya adalah media merupakan

¹¹ Lihat Sonja K. Foss, Karen A. Foss, dan Robert Trapp, *Contemporary Perspective on Rhetoric* (Illinois: Waveland Press, 1985), hal. 195-198. Bandingkan uraian mengenai prosedur wacana ini dalam Mills, *ibid.*, hal. 63-67. Prosedur semacam ini lebih memiliki kekuatan untuk melakukan eksklusi atau penyingkiran, yakni: Pertama, terdapat subyek-subyek tertentu yang sulit dibicarakan secara terbuka dalam masyarakat, terutama dalam bentuk larangan dan tabu, misalnya saja seks dan kematian. Kedua, terdapat pihak-pihak yang diposisikan gila alias tidak waras sehingga pernyataan-pernyataannya dianggap tidak rasional. Ketiga, terdapat berbagai jenis pengetahuan (*knowledge*) yang dipandang benar dan pengetahuan yang dipertimbangkan sebagai salah. Pemikiran Foucault (1926-1984) yang lebih kompleks tentang wacana dikaitkan dengan ekonomi politik kebenaran, selengkapnya dapat dibaca pada Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980), hal. 109-133.

kekuatan-kekuatan yang melakukan mediasi yang pada saat melaporkan berbagai kejadian secara otomatis mengemukakan berbagai cara pandang tertentu sebagai hasil dari interpretasi terhadap kejadian-kejadian itu.

Media pada proses berikutnya bisa membentuk dan melakukan penstrukturan terhadap kesadaran kita yang memiliki konsekuensi secara sosial maupun politis. Dipandang dari perspektif yang demikian, media tidaklah terpisah dari realitas sosial (*apart from social reality*), melainkan salah satu bagian dari realitas sosial itu sendiri (*a part of social reality*).¹² Jika media massa merupakan bagian dari realitas sosial, maka media tidak akan pernah bersifat pasif. Media akan bertindak aktif dengan menjalankan teknik-teknik pemberitaan yang cukup rapi dan seakan-akan terjadi begitu saja, yakni dalam mekanisme bagaimana media memilih dan memperlakukan (*treated*) suatu topik berita serta dengan cara bagaimana topik itu dituturkan (*told*).¹³

Sebagai contoh konkret adalah berita-berita kejahatan (kriminalitas) yang seringkali ditampilkan media dan dikonsumsi masyarakat secara rutin dalam kehidupan keseharian. Apa yang disebut dengan kejahatan tidak pernah tampil dengan sendirinya. Terdapat tiga relasi definisi yang berbeda yang dikemukakan oleh masing-masing pihak dalam memahami kejahatan, yaitu definisi yang dikemukakan oleh pihak resmi, definisi yang disajikan oleh media, serta definisi yang dilontarkan oleh publik. Setiap definisi mengenai kejahatan ini secara sosial adalah hasil konstruksi karena diproduksi dalam proses sosial dan institusional yang berlainan.

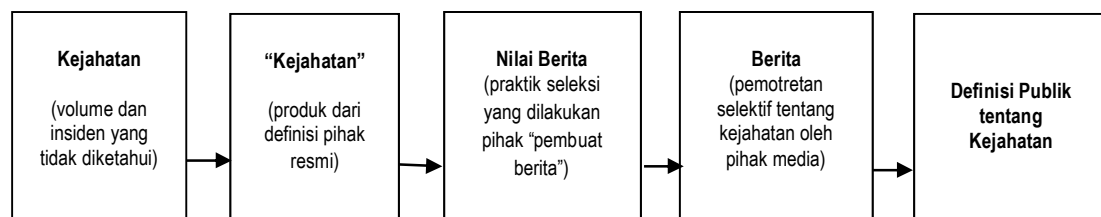
Apabila diuraikan lebih lanjut, maka definisi yang dikemukakan oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri. Pertama, definisi mengenai kejahatan dari pihak resmi (*official definition*), seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan sebagainya dikaitkan dengan kontrol terhadap tindak kejahatan. Kedua, definisi media (*media definition*) merupakan se bentuk konstruksi yang menunjukkan bagaimana kalangan jurnalis melakukan seleksi terhadap peristiwa kejahatan yang dianggap layak untuk ditampilkan media berdasarkan pada alasan nilai berita. Ketiga, definisi publik (*public definition*) mengenai kejahatan yang dikonstruksikan oleh pihak awam sebenarnya lebih menunjukkan pada bagaimana mereka sedikit atau sama sekali tidak memiliki pengalaman maupun keahlian dalam apa yang disebut dengan

¹² Tony Bennett, "Media, 'Reality', Signification" dalam Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran dan Janet Woollacott (eds.), *Culture, Society, and the Media* (London dan New York: Routledge, 1986), hal. 288.

¹³ John Hartley, *Understanding News* (London dan New York: Routledge, 1989), hal. 42-47.

kejahatan. Kesemua ini menunjukkan bahwa penyajian kasus kejahatan yang telah dipilih media memainkan peranan yang penting dalam membentuk definisi publik mengenai “masalah kejahatan” dan hal itulah yang kemudian ditanggapi oleh definisi dari pihak resmi.¹⁴

Apabila digambarkan secara skematis, maka hasilnya adalah sebagai berikut:



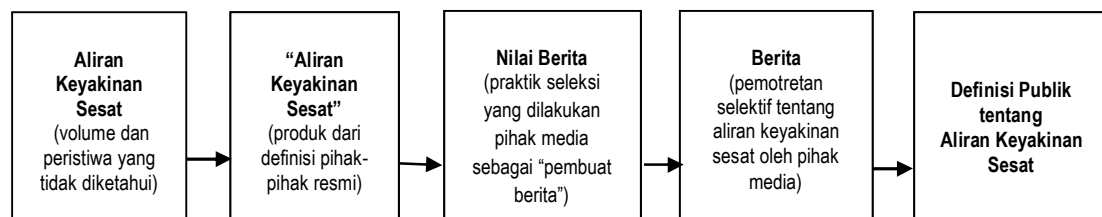
Keterangan: Skema ini diambil dari Cohen dan Young (eds), 1981, hal. 29.

Dalam konteks berita kejahatan menjadi jelas bahwa publik hanya mampu memberikan definisi setelah mengonsumsi pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan yang ditampilkan oleh media. Padahal, media sendiri dalam menampilkan pemberitaan mengenai kejahatan memiliki mekanisme internalnya yang spesifik, misalnya saja seleksi terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang dianggap layak untuk diberitakan. Selain itu, dan hal ini yang tidak kalah penting, pihak media sendiri sangat tergantung pada pihak resmi (polisi, kejaksaan, hakim, ahli kriminologi, dan sebagainya) yang dianggap memiliki pengetahuan yang benar dan mencukupi mengenai berbagai kasus kejahatan. Dalam kaitan persoalan ini, pihak yang paling tergantung akibat tidak memiliki pengalaman serta pengetahuan resmi mengenai berbagai kasus kejahatan, yaitu publik, sangat mungkin untuk mendapatkan informasi yang sudah mengalami sekian banyak distorsi.

Fenomena yang terdapat pada berita-berita kriminalitas itu juga terjadi dalam pemberitaan kaum beragama minoritas. Dalam berbagai pemberitaan tersebut, media biasanya menempatkan sumber-sumber resmi yang menangani persoalan keyakinan sebagai pihak yang lebih diutamakan. Sumber-sumber resmi yang lazim dikutip komentar-komentarnya oleh media adalah menteri agama, para pengurus organisasi keagamaan yang memiliki jumlah anggota yang sangat banyak (misalnya saja adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), pihak-pihak yang bertentangan secara langsung dengan kelompok beragama minoritas (seperti Front Pembela Islam/FPI),

¹⁴ Stanley Cohen dan Jock Young (eds.), *The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass Media* (California: Sage Publications, 1981), hal. 29.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan para pengamat di bidang keyakinan. Apabila digambarkan dalam sebuah skema, maka akan terlihat seperti berikut ini:



Dalam perspektif yang lain dapat juga dikemukakan bahwa praktik-praktik yang dijalankan media dalam menampilkan (atau tidak menampilkan) suatu komentar atau pernyataan dari berbagai pihak yang membentuk suatu definisi tertentu semacam itu disebut dengan representasi (*representation*). Secara terminologis representasi dapat diartikan sebagai “produksi makna konsep-konsep dalam pemikiran kita melalui bahasa”. Dalam representasi itu sendiri terdapat “kaitan antara konsep-konsep dan bahasa yang menjadikan kita mampu untuk merujuk pada dunia obyek-obyek, orang-orang atau kejadian-kejadian yang ‘nyata’, atau bahkan dunia-dunia imajiner dari obyek-obyek, orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang bersifat fiksional”.¹⁵

Persoalan lain yang juga harus mendapatkan penekanan dari praktik-praktik representasi yang dijalankan media adalah pada saat media melakukan “penghadiran kembali realitas”, baik yang merujuk pada peristiwa atau pun komentar tertentu, pasti terdapat bagian-bagian yang sengaja ditonjolkan atau disembunyikan. Hal inilah yang disebut dengan politik representasi yang dijalankan media. Apabila pemberitaan media dilihat sebagai pelaksanaan dari penghadiran (dan penghilangan) suatu realitas, maka berita-berita yang disajikan media dengan sendirinya merupakan sebarang konkret dari politik representasi, dan praktik-praktik itulah yang setiap hari dijalankan media. Rangkaian peristiwa ini telah menunjukkan bahwa politik representasi sebenarnya memproduksi dan juga diproduksi, serta mengatur dan diatur, oleh wacana yang berisi berbagai prosedur tertentu.

F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

¹⁵ Stuart Hall, “The Work of Representation” dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (New Delhi: Sage Publications, 1997), hal. 17.

Penelitian ini merupakan kajian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Menurut van Dijk, analisis wacana kritis merupakan tipe penelitian analitis wacana yang secara primer mengkaji penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi, dan ketidakadilan yang dilakukan, direproduksi, dan dilawan oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial dan politik. Dengan tipe penelitian semacam ini, analisis wacana kritis secara eksplisit mengambil posisi, dan dengan demikian ingin memahami, mengungkapkan, dan pada akhirnya menentang ketidakadilan sosial tersebut.¹⁶

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah berita-berita pada bulan Februari 2011 yang berkaitan dengan peristiwa penyerangan terhadap kalangan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang dimuat di *Suara Merdeka*.

3. Teknik pengumpulan dan analisis data

Dalam mengumpulkan dan menganalisis berita-berita tentang penyerangan yang dialami oleh para pengikut Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ini digunakan analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. van Dijk.¹⁷ Pengumpulan dan analisis ini dilakukan pada skema berita (*news schema*) yang terdiri dari:

- a. *Judul berita* dan *teras berita* merupakan bagian yang mengekspresikan secara langsung proposisi-proposisi tingkat lebih tinggi dari wacana berita. Judul berita merupakan kategori pertama yang membuka sebuah wacana. Fungsi dari judul berita dan teras berita adalah sebagai ringkasan dan merupakan kategori yang paling nyata dari wacana berita.
- b. *Reaksi-reaksi verbal* yang merujuk pada kutipan-kutipan dari pihak-pihak yang diwawancarai yang dihadirkan dalam wacana.

¹⁶ Teun A. van Dijk, "Critical Discourse Analysis" dalam D. Tannen, D. Schiffrin, dan H. Hamilton (eds.), *Handbook of Discourse Analysis* (Oxford: Blackwell, 2001), hal. 352-371.

¹⁷ Lihat Teun A. van Dijk, "The Interdisciplinary Study of News Discourse" dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski (eds.), *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research* (London dan New York: Routledge, 1993), hlm., 108-120. Contoh penerapan analisis model berita ini dapat dibaca pada Valdenise Schmitt, Fransisco Antonio Pereira Fialho, dan Lucilia Panisset Travassos, "News Structure in the Press: A Study of the Applicability of the van Dijk Analysis", *The Fourth International Cyberspace Conference on Ergonomics, Johannesburg: International Ergonomics Association Press, 2005*.

- c. *Peristiwa utama* yang menghadirkan deskripsi yang secara aktual merupakan berita itu sendiri.
- d. *Konsekuensi-konsekuensi* yang mengorganisasikan seluruh peristiwa (kejadian) yang digambarkan sebagai hal yang digunakan sebagai alasan atau disebabkan oleh peristiwa utama.
- e. *Komentar-komentar* yang memuat kesimpulan-kesimpulan, harapan-harapan, spekulasi-spekulasi, dan informasi lain pada peristiwa yang terdapat pada bagian akhir berita, namun kehadirannya tidak selalu harus ditampilkan dalam berita.
- f. *Latar belakang* berisi informasi yang bukan dari bagian peristiwa-peristiwa yang ditampilkan berita, seperti sejarah (kejadian-kejadian masa lalu dan sekarang), peristiwa-peristiwa sebelumnya (kejadian spesifik yang mendahului peristiwa utama dan dapat diperlakukan sebagai sebuah sebab dalam kondisi langsung), dan konteks (yang mengorganisasikan informasi pada situasi sekarang ini di mana peristiwa utama merupakan elemen yang penuh makna).

Analisis tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Judul berita
Teras berita
Reaksi-reaksi verbal
Peristiwa utama
Konsekuensi
Komentar-komentar
Latar belakang

4. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis tekstual pemberitaan. Maksudnya adalah penelitian ini membahas struktur-struktur mikro (berita-berita yang dimuat *Suara Merdeka*) saja, namun mengabaikan struktur-struktur makro dari kelompok-kelompok (jurnalis, pengamat, para pengikut Ahmadiyah sebagai kelompok beragama minoritas, dan kalangan penentang Ahmadiyah) dan lembaga-lembaga (surat kabar, pemerintah, dan berbagai organisasi keagamaan) yang melingkupinya.

5. Kualitas penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk membahas pemberitaan yang menampilkan kekerasan yang dialami kelompok beragama minoritas, dalam hal ini para pengikut Ahmadiyah, yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia.

BAB II

SKEMA PEMBERITAAN

PENYERANGAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH

INDONESIA DI CIKEUSIK, PANDEGLANG, BANTEN

Dalam bab ini diuraikan tentang skema pemberitaan Harian *Suara Merdeka* edisi Februari 2011 dalam kasus penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di daerah Cikeusik, Pandeglang, Banten. Skema pemberitaan tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel untuk dapat menguraikan secara jelas tentang judul berita, subjudul berita, dan teras berita yang menyajikan ikhtisar (pernyataan-pernyataan ringkas yang memuat gagasan-gagasan utama dari setiap peristiwa); reaksi-reaksi verbal, baik yang berupa pernyataan yang dikutip secara langsung atau tidak langsung, dari para narasumber berita; peristiwa utama yang mendeskripsikan sebuah kejadian yang dipakai jurnalis untuk menuliskan berita; konsekuensi-konsekuensi yang memuat akibat-akibat yang ditimbulkan dari peristiwa utama; komentar-komentar yang memuat kesimpulan, harapan, spekulasi, dan informasi lain yang secara eksplisit maupun implisit terdapat dalam berita; serta, latar belakang yang memuat konteks kejadian, sehingga peristiwa utama dapat dipahami secara baik.

Ulasan akan diberikan pada gaya penulisan, yakni diksi (pilihan kata), frasa, dan kalimat-kalimat, pada judul berita, subjudul berita, dan teras berita, dan bagian-bagian lain dari skema berita yang dianggap paling relevan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Gaya penulisan merupakan persoalan yang harus diperhatikan dalam kaitan ini. Sebagaimana dikemukakan van Dijk, gaya penulisan merupakan hasil pilihan-pilihan tekstual untuk mengemukakan suatu kejadian dengan memakai kata-kata atau pun struktur sintaksis (kalimat) tertentu. Pilihan terhadap gaya penulisan tersebut memiliki implikasi ideologis. Dalam kaitan ini, berita tidak lagi dianggap sebagai laporan yang netral dari kalangan jurnalis, melainkan sebagai opini-opini tentang para pelaku dan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam berita.¹ Jadi, berita dipandang sebagai teknik untuk memaparkan gagasan ideologis daripada sekadar pemaparan peristiwa.

¹ Teun A. van Dijk, "The Interdisciplinary Study of News as Discourse" dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski (eds.), *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research* (London dan New York: Routledge, 1993), hal. 115-116.

A. Dialog untuk membahas sumber pembuat kekerasan

Setelah peristiwa penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terjadi dan mendapatkan liputan yang luas dari berbagai media massa, *Suara Merdeka* (edisi 7 Februari 2011) juga menurunkan berita dengan topik yang sama. Adapun skema beritanya adalah seperti berikut ini:

1. *Suara Merdeka* edisi 7 Februari 2011

Judul berita	Utamakan Dialog dengan Warga Ahmadiyah
Subjudul	Aksi Bentrok di Pandeglang
Teras berita	Berbagai pihak berharap agar mendahulukan dialog sebagai upaya penyelesaian secara tuntas, menyusul aksi bentrok warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu kemarin.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none">✓ Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar:<ul style="list-style-type: none">• "Polisi setempat sudah bisa mengendalikan situasi."• "Belum ada, masih tahap penyelidikan," ketika ditanya apakah sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.✓ Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Nusron Wahid:<ul style="list-style-type: none">• Negara segera bertindak tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak kekerasan, serta melindungi warga negara. Apalagi kejadian semacam ini tidak hanya terjadi sekali.• "Menegakkan kebenaran agama harus dengan jalan yang benar. Bukan malah mencoreng kebenaran dan kesucian ajaran agama. Harusnya dialog lebih diutamakan."✓ Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo:<ul style="list-style-type: none">• "Pemerintah harus bertanggung jawab. Apapun penjelasan pihak aparat keamanan mesti melindungi masyarakat."• Warga Ahmadiyah juga warga negara.• "Kalau ajarannya dianggap salah, harus dibina dan diluruskan. Apalagi ada Kementerian Departemen Agama (Kemenag), bertugas melaksanakan pembinaan."✓ Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Marwan Ja'far:<ul style="list-style-type: none">• Penyerbuan tersebut melanggar hak asasi manusia dan mengingkari prinsip ajaran Islam yang damai.• "Itu menunjukkan masih ada perilaku kurang benar dalam bertoleransi beragama di Indonesia, serta terjadi kemunduran."• Fraksi PKB menyerukan semua elemen menggunakan dialog menjadi jalan keluar.
Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none">• Semua elemen masyarakat menggunakan dialog sebagai jalan keluar.• Polisi sudah mampu mengendalikan situasi di tempat kejadian.• Negara harus bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan kekerasan.• Warga Ahmadiyah harus tetap dilindungi.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik

Judul yang dipilih pada skema berita di atas hendak menunjukkan bahwa penyelesaian yang paling baik pada kasus ini adalah dengan cara dialog. Kekerasan dianggap sebagai jalan yang salah. Sebabnya adalah kekerasan yang diwujudkan

dengan cara menjalankan penyerbuan telah dinilai melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menonjolkan perdamaian. Hanya saja, apabila disimak pada subjudul beritanya, maka peristiwa itu bukan disebut sebagai penyerangan, namun melainkan sebagai bentrokan.² Pengertian bentrokan dengan penyerangan, tentu saja, sangat berbeda. Bentrokan mengandaikan adanya kekuatan yang berimbang antara pihak-pihak yang bertikai. Berbagai pihak yang terlibat dalam bentrokan, baik dari pihak Ahmadiyah maupun pihak lainnya, dianggap memiliki kekuatan yang berimbang. Sementara itu, penyerangan mengandaikan bahwa pihak yang menyerang memiliki kekuatan yang lebih besar dan bersikap aktif. Sebaliknya, pihak yang diserang tidak mempunyai kekuatan yang sama (lebih kecil) dan bersikap pasif. Dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan bentrokan, dan bukan kasus penyerangan, maka memberikan pengandaian bahwa Ahmadiyah juga turut bersalah dalam kejadian itu.

Sejumlah narasumber, yang memainkan peran-peran tertentu,³ ditampilkan dalam berita tersebut. Narasumber dari pihak kepolisian menyatakan bahwa situasi di lapangan sudah terkendali dan belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Pihak-pihak lain yang ditampilkan sebagai narasumber menyatakan bahwa negara harus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan, pemerintah harus memberi pertanggungjawaban terhadap peristiwa itu, dan telah terjadi kemunduran dalam hal bertoleransi agama di Indonesia.

2. *Suara Merdeka* edisi 8 Februari 2011

Judul berita	Ahmadiyah Ditawari Jadi Aliran Kepercayaan
Subjudul	Polda Jateng Siap Melindungi
Teras berita	Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menawarkan opsi ajaran Ahmadiyah menjadi aliran kepercayaan. "Opsi ini diambil agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengikut Ahmadiyah dan masyarakat. Tapi saya belum berani mengatakan opsi pembubaran Ahmadiyah, karena masih banyak opsi yang harus dikaji pemerintah," kata Suryadharma usai pembukaan Muswil VI PPP Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kemarin.

² Bandingkan dengan pemilihan kata yang dilakukan oleh *Koran Tempo* (edisi 7 Februari 2011) yang menurunkan judul "Ahmadiyah Diserang, Tiga Meninggal"; *Tempo Interaktif* (edisi 6 Februari 2011, 16.45 WIB) yang menyajikan judul "Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik"; dan, *Kompas.com* (edisi Minggu, 6 Februari 2011, 13.04 WIB) yang menampilkan judul "Seribuan Warga Cikeusik Serang Jamaah Ahmadiyah".

³ Dalam kajian kebahasaan, hal ini disebut sebagai peran-peran semantik (*semantic roles*) atau peran-peran tematik (*thematic roles*). Artinya adalah terdapat pihak-pihak tertentu yang memenuhi peranan atau tugasnya dalam kejadian tertentu. Lihat George Yule, *The Study of Language, Third Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hal. 102.

Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali: <ul style="list-style-type: none"> • Hal yang penting masyarakat tidak bertindak anarkis kepada siapa pun. • "Serahkan kepada aparat penegak hukum jika memang ada yang salah. Kami mengevaluasi pelaksanaan SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri soal Ahmadiyah. Kami tidak mengevaluasi materi SKB. Pelaksanaan SKB di lapangan yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat." ✓ Zafrullah A Pontoh, Juru Bicara Ahmadiyah: <ul style="list-style-type: none"> • Polisi sudah memberikan informasi mengenai rencana penyerangan oleh warga kepada jemaat Ahmadiyah tiga hari sebelum kejadian. • Polisi juga sudah berjaga di lokasi, namun tetap tidak mampu menghadapi ribuan orang. • Polisi tidak menghentikan penyerangan ketika massa memukuli dan menyiksa warga Ahmadiyah. • Jemaat Ahmadiyah tidak pernah melakukan provokasi dan penyerangan lebih dahulu ✓ Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar: <ul style="list-style-type: none"> • Diduga ada pihak yang sengaja melakukan mobilisasi massa, kemudian menghasut mereka sehingga terjadi penyerangan tersebut. • Penyidik tengah memeriksa sembilan saksi dan sejumlah warga untuk dimintai keterangan. • Sebelum terjadi kerusuhan itu, polisi telah menerima laporan dari masyarakat akan ada aksi sekelompok orang di rumah Suparman, salah satu pengikut Ahmadiyah. • Polisi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah melakukan langkah persuasif, yakni meminta kegiatan di rumah Suparman dihentikan sejak Jumat (4/2). Namun permintaan persuasif itu diabaikan. ✓ Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim: <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak cukup hanya mengatakan prihatin atas peristiwa kekerasan di Cikeusik, Pandeglang, Banten. • Peristiwa tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah konkret, yakni menyelesaikannya di persidangan. • "Menteri Agama harus bisa menjamin warga negara dan melindungi pemeluk agama apa pun. Kami minta Menteri Agama bertindak proporsional." ✓ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimmly Ashidique: <ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah bisa dipindahkan dari lapangan ke ruang sidang. • "Saya tidak tega melihat mereka diperlakukan semena-mena, tidak berperikemanusiaan, dibunuh, disiksa, dirusak hartanya, diberangus haknya, dan rasa amannya." ✓ Wakil Ketua DPR Pramono Anung: <ul style="list-style-type: none"> • Kecewa dengan sikap aparat keamanan yang seakan melakukan pembiaran atas kejadian tersebut. • Hal itu semakin membuktikan bahwa negara tidak pernah hadir ketika rakyat sedang membutuhkan perlindungan. • "Pimpinan DPR akan memanggil Kapolri dan Menkumham untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan masalah ini." ✓ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah tidak dapat dibenarkan. Para penyerang harus diusut tuntas karena melanggar kebebasan hak asasi beragama. • Dalam pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia ada batasan dan syarat yang tidak boleh dilanggar serta harus dipatuhi semua pihak. Semuanya terangkum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. • Pelaksanaan hak asasi manusia dibatasi peraturan perundang-undangan
----------------------	--

	<p>yang mengatur norma kehidupan dengan empat kualifikasi yang tidak boleh terabaikan yakni nilai-nilai agama, moral, ketertiban umum, dan keamanan.</p> <p>✓ Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihaknya siap memberikan perlindungan terhadap jemaat Ahmadiyah di provinsi ini. • Selama ini Polda Jateng, Pemprov, dan Pemkab senantiasa menjalin komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk menjaga suasana kondusif. Meski kehidupan beragama di Jawa Tengah tetap aman dan terkendali, potensi konflik tetap ada
Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan anarkis tidak dapat dibenarkan. • Polisi tidak menghentikan serangan terhadap pengikut Ahmadiyah. • Negara tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. • Kasus kekerasan ini harus dibawa ke persidangan. • Pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh melanggar hak asasi warga lainnya. • Polisi harus memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Pada bagian judul pada skema berita di atas (*Suara Merdeka*, 8 Februari 2011) menunjukkan bahwa Ahmadiyah akan diberikan pilihan sebagai aliran kepercayaan. Tidak ditunjukkan pada judul berita itu siapa atau pihak mana yang akan memberikan tawaran itu. Namun, setelah kita membaca teras beritanya akan diketahui bahwa pihak yang menawarkan adalah Menteri Agama Suryadharma Ali. Dalam judul berita itu bisa diketahui bahwa posisi atau kedudukan Ahmadiyah adalah sebagai tema karena akan dipengaruhi oleh aksi atau tindakan yang dijalankan oleh agen, yakni Menteri Agama.⁴ Dengan menyimak judul dan teras berita tersebut, maka dapat dipastikan bahwa posisi Menteri Agama lebih superior dibandingkan dengan posisi Ahmadiyah yang demikian inferior. Menteri Agama mempunyai otoritas yang sangat menentukan dibandingkan dengan pihak Ahmadiyah yang berada dalam kedudukan untuk ditentukan. Menteri Agama sebagai subyek dan Ahmadiyah sekadar sebagai obyek.⁵ Seterusnya, dapat diuraikan bahwa Menteri Agama bertindak aktif untuk menyajikan tawaran, sebaliknya Ahmadiyah harus bersikap menunggu (pasif).

⁴ Pada kajian semantik, hal ini disebut sebagai relasi antara agen (*agent*) dan tema (*theme*). Agen adalah entitas yang menampilkan tindakan tertentu. Sedangkan tema adalah entitas yang terlibat dalam atau dipengaruhi tindakan tersebut. Lihat Yule, *ibid.*, hal. 102-103.

⁵ Obyek dalam hal ini biasa disebut juga sebagai obyek agentif, yakni obyek dari sebuah kata kerja yang menampilkan tindakan dari kata kerja tersebut. Lihat Jack C. Richards dan Richard Schmidt, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, Fourth Edition* (London: Pearson, 2010), hal. 19.

3. *Suara Merdeka* edisi 9 Februari 2011

Judul berita	Ulama NU Berupaya Menyadarkan Ahmadiyah
Subjudul	
Teras berita	Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, sudah lama para ulama Nahdlatul Ulama (NU), berusaha menyadarkan warga Ahmadiyah agar menjalankan ajaran Islam secara benar.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi: • Namun, hal itu sulit dilakukan karena tidak mudah mengubah keyakinan seseorang. • “Ahmadiyah bertentangan dengan Islam. Tapi yang jelas, kasus ini merusak nama baik Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mengedepankan keberagaman.” • Mendukung penyelesaian masalah Ahmadiyah melalui SKB tiga menteri. Namun, pelaksanaan di lapangan masih ‘kedodoran’. • Ahmadiyah sebenarnya menjadi masalah karena ajaran ini mengatasnamakan Islam tetapi tidak sesuai dengan agama Islam. • Seandainya Ahmadiyah menjadi agama sendiri, maka Ahmadiyah itu dalam posisi menjalani hak sebagai warga negara dalam beragama. • “Penodaan agama itu berbeda dengan kebebasan beragama. Ini kadang orang tidak bisa membedakan.” ✓ Dr Rumadi Mag, peneliti The Wahid Institute: • SKB No 3/2008, No Kep-033/A/JA/ 6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat, satu sisi bisa dipakai untuk mengontrol dan menghantam Ahmadiyah, tapi juga bisa menjadi tempat berlindung keberadaan Ahmadiyah. • Dari pasal SKB tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. Yang ada hanya diminta untuk menghentikan aktivitasnya. “Aktivitas apa yang dimaksud juga tidak jelas, apakah aktivitas komunal atau aktivitas individu.” • Bila mencermati salah satu pasal, maka hanya terkait penafsiran yang dianggap tidak sesuai Islam pada umumnya, yaitu harus menghentikan aktivitasnya tentang pengakuan adanya nabi setelah Muhammad SAW. ✓ Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar: • Meminta semua pihak tidak terburu-buru menilai telah terjadi pelanggaran HAM dalam tragedi Cikeusik. • Juga tidak terburu-buru menilai tidak ada pelanggaran dalam peristiwa tersebut. • Pihak yang melakukan kekerasan pasti bersalah. ✓ Pengacara senior Todung Mulya Lubis: • Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali di beberapa kesempatan, sebaiknya Ahmadiyah dibubarkan dapat menyulut aksi kelompok kontra Ahmadiyah melakukan tindak kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. • “Menteri Agama harus mundur. Dia sudah seharusnya diganti karena sudah tak dapat berdiri di atas semua kelompok umat beragama dan berkeyakinan. Pandangannya telah mempersubur konflik yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Presiden harus tahu itu.” ✓ Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendarli: • “Kami lihat Menag sering memasukkan kepentingannya ke dalam agenda negara. Pernyataannya yang sarat kepentingan bisa digolongkan sebagai menyulut kekerasan dan membuat orang terprovokasi. Sebagaimana pernyataannya dalam menyikapi Ahmadiyah. Seharusnya dia mundur.”
Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.

Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmadiyah sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. • SKB dapat digunakan sebagai alat untuk menghantam Ahmadiyah, namun sekaligus juga pelindung bagi pengikut Ahmadiyah. • Tidak terburu-buru menilai ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kekerasan ini. • Menteri Agama harus mundur.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Alasan kenapa Ahmadiyah diserang tidak lain karena penganut kepercayaan itu dipandang telah keluar dari nilai dasar agama Islam yang benar. Setidaknya, hal tersebut dapat disimak pada judul berita (*Suara Merdeka*, 9 Februari 2011) di atas. Dalam penjelasan yang diberikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi, sebagaimana yang dapat dibaca pada bagian teras berita, telah sangat lama kalangan ulama NU berupaya menyadarkan Ahmadiyah agar menjalankan ajaran Islam secara benar. Dari judul berita tersebut memang secara eksplisit Ahmadiyah tidak disebut sebagai ajaran atau kelompok yang sesat. Namun, apabila dilihat dalam analisis wacana, terdapat implikatur (*implicature*), yakni suatu ucapan yang dikemukakan sang pembicara yang mengimplikasikan sesuatu hal lain yang tidak dikatakan (makna tambahan yang disampaikan secara terselubung).⁶

Melalui sudut pandang demikian, maka bisa dikemukakan bahwa Ahmadiyah dalam kondisi tidak sadar atau sesat. Sebaliknya, kalangan ulama NU dalam keadaan sadar atau benar, sehingga mereka berhak untuk mengajak Ahmadiyah yang sesat itu untuk kembali kepada jalan yang benar (tidak sesat). Jadi, apa yang diimplikasikan dan apa yang dikatakan memiliki jalinan yang sedemikian dekat. Apa yang dikatakan merupakan bagian makna yang ditentukan oleh syarat-kebenaran semantik. Apa yang diimplikasikan merupakan bagian dari makna yang tidak ditampilkan dalam syarat-kebenaran itu.⁷ Apabila implikatur itu dikatakan secara eksplisit dalam relasi oposisi biner, maka akan terlihat secara konkret bahwa NU adalah benar, sedangkan pihak Ahmadiyah sesat (tidak benar). Seterusnya, NU mengajak kepada jalan kebenaran, dan Ahmadiyah diajak pada jalan kebenaran. Hal ini disebabkan bahwa NU memang memiliki klaim kesadaran (kebenaran), sedangkan Ahmadiyah berada dalam keadaan tidak sadar (ketidakbenaran).

⁶ Lihat Yule, *op. cit.*, hal. 131.

⁷ Lihat J. Meibauer, "Implicature" dalam Jacob L. Mey (ed.), *Concise Encyclopedia of Pragmatics, Second Edition* (Oxford: Elsevier, 2009), hal. 365.

4. *Suara Merdeka* edisi 10 Februari 2011

Judul berita	Menag Usulkan Empat Opsi untuk Ahmadiyah
Subjudul	
Teras berita	Secara pribadi Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan mempunyai empat usulan terkait Ahmadiyah di Indonesia. Pertama, Ahmadiyah menjadi agama baru yang tersendiri dan terpisah dari Agama Islam. Kedua, Ahmadiyah masuk kembali ke ajaran agama Islam sesuai yang dituntunkan oleh Alquran dan sunnah. Ketiga, Ahmadiyah dibiarkan berkembang di Indonesia karena ada yang menganggap bahwa hal tersebut bagian dari Hak Asasi Manusia.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menteri Agama Suryadharma Ali: • "Usulan terakhir, Ahmadiyah dilarang atau dibubarkan karena dianggap ajaran sesat oleh kalangan umat Islam. Perlu digarisbawahi bahwa itu adalah usulan pribadi, bukan kebijakan pemerintah." • Jamaah Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya di Indonesia berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat dan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008. • Ajaran Ahmadiyah yang mengaku Islam namun mereka memiliki kitab dan nabi sendiri adalah bentuk penodaan terhadap ajaran Islam. ✓ Ketua FPI Habib Rizieq: • Front Pembela Islam (FPI) menyerukan agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah. • "Presiden kita tidak berani membubarkan Ahmadiyah. Padahal, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan peraturan yang membubarkan Ahmadiyah. Begitu juga di Garut. Bahkan, di Sumatera Selatan, Gubernur Sumsel berani mengeluarkan peraturan gubernur yang mengatur pembubaran Ahmadiyah di provinsi tersebut. Kenapa Presiden kita yang mantan jenderal tidak berani?"
Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Empat pilihan untuk menangani persoalan Ahmadiyah. • Ajaran Ahmadiyah merupakan penodaan terhadap agama Islam karena memiliki kitab dan nabi sendiri. • Ahmadiyah dilarang atau dibubarkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Agama Suryadharma Ali untuk meregulasikan persoalan keyakinan kembali ditampilkan pada pemberitaan *Suara Merdeka* (edisi 10 Februari 2011). Berita ini terkait dengan berita yang telah ditampilkan *Suara Merdeka* (edisi 8 Februari 2011) yang memuat tentang tawaran dari Menteri Agama kepada Ahmadiyah untuk berstatus sebagai aliran kepercayaan. Dalam skema berita di atas ditunjukkan bahwa tawaran kepada Ahmadiyah ternyata tidak hanya satu pilihan (opsi), melainkan empat pilihan, yakni Ahmadiyah menjadi agama yang sama sekali baru di luar Islam; Ahmadiyah kembali masuk ke dalam ajaran Islam yang dominan; Ahmadiyah dibiarkan berkembang karena dianggap

sebagai realisasi dari hak asasi manusia; dan, Ahmadiyah dilarang atau dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan agama Islam yang dianut kalangan muslim yang lain. Berita ini menunjukkan bagaimana kedudukan Menteri Agama sebagai subyek dan posisi Ahmadiyah sebagai obyek.

Hanya saja, tiga tawaran yang dikemukakan, yakni Ahmadiyah menjadi agama baru; Ahmadiyah kembali kepada ajaran Islam; dan, Ahmadiyah dibubarkan semakin memposisikan pandangan bahwa Ahmadiyah memang termasuk ke dalam ajaran agama yang sesat. Tuduhan sesat terhadap pihak Ahmadiyah dalam pemberian opsi ini memang tidak dikatakan secara langsung, tapi melainkan secara konseptual dengan menampilkan bagian atau komponen-komponen dasarnya. Sebagaimana kalau kita menyebut jarum, maka komponen-komponen dasar yang bisa dimasukkan adalah tipis, tajam, dan instrumen dari baja.⁸ Dalam merujuk Ahmadiyah, aneka komponen dasar yang disebut (ke dalam opsi) adalah “agama baru”, “bukan Islam”, dan “sesat sehingga harus dilarang”. Komponen hak asasi manusia sekadar ditambahkan saja untuk melengkapi tiga komponen sebelumnya, karena “ada yang menganggap bahwa hal tersebut bagian dari Hak Asasi Manusia”. Pihak yang menganggap hal ini sebagai problem hak asasi manusia pun berada dalam kedudukan yang tidak menentukan.

5. *Suara Merdeka* edisi 11 Februari 2011

Judul berita	Kemenag Ajak Ahmadiyah Dialog
Subjudul	
Teras berita	Untuk mencari solusi terbaik menyangkut kasus Ahmadiyah, Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar dialog dengan organisasi itu. Forum dialog tersebut akan mempertemukan Ahmadiyah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini menaruh perhatian terhadap eksistensi kelompok itu.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menteri Agama Suryadharma Ali: <ul style="list-style-type: none"> • ”Biar Ahmadiyah sendiri yang menjelaskan ajarannya agar jelas mana Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Jadi akan lebih enak untuk dipahami.” • Dialog tidak hanya membuat masyarakat jelas, namun juga memberi landasan pemerintah dalam mengambil sikap terkait Ahmadiyah. • Ada empat alternatif yang dipertimbangkan terkait Ahmadiyah. Pertama, menjadi sekte tersendiri dengan menanggalkan atribut keislaman. Dengan demikian mereka tidak lagi menggunakan al-Quran dan ajaran Islam secara sepotong-sepotong. Kedua, Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang benar atau menerima seluruh ajaran dalam Islam. Alternatif lain adalah Ahmadiyah dibiarkan hidup di Indonesia. Alternatif terakhir dibubarkan. • ”Masih dikaji mendalam dan terbuka kemungkinan ada alternatif lain. Namun untuk memuaskan semua pihak sulit rasanya.”

⁸ Lihat, Yule, *op. cit.*, hal., 100.

Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmadiyah diajak berdialog. • Ada empat alternatif penyelesaian dan ada alternatif lain yang masih mungkin muncul, namun semua itu tidak bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Superioritas Menteri Agama dalam menyelesaikan kasus Ahmadiyah semakin nyata ketika kementeriannya tidak hanya menawarkan empat pilihan (opsi) kepada Ahmadiyah, melainkan juga mengajak kelompok ini untuk berdialog sebagaimana ditunjukkan dalam pemberitaan *Suara Merdeka* (edisi 11 Februari 2011). Pihak-pihak yang dilibatkan dalam dialog itu tidak hanya bersifat diametral, antara Kementerian Agama dengan Ahmadiyah, melainkan juga meluas kepada pihak-pihak lain, seperti Majelis Ulama Indonesia, berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian terhadap keberadaan Ahmadiyah.

Namun, dialog itu, merujuk kepada pernyataan Menteri Agama, dimaksudkan untuk “menjelaskan ajarannya agar jelas mana Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Jadi akan lebih enak untuk dipahami.” Artinya adalah pada dialog itu nantinya Ahmadiyah bukan sekadar diajak berbicara dalam posisi yang setara, melainkan yang jauh lebih penting adalah pihak Ahmadiyah membuat pengakuan. Padahal, apa yang disebut sebagai pengakuan (*confession*) itu bukan sekadar pernyataan terbuka bahwa mereka memang melawan hukum, namun juga terdapat upaya untuk mentransformasikan keinginan dari pihak yang memberikan pengakuan untuk masuk ke dalam wacana.⁹ Dengan adanya pengakuan itu, maka Ahmadiyah diharapkan memberikan sikap patuh atau ketaatan dalam bentuk ucapan-ucapan yang memuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam dominan. Melalui pernyataan-pernyataan itu, para pengikut atau ajaran Ahmadiyah dikategorikan sebagai ajaran keagamaan yang sesat.

B. Reaksi Penolakan Ahmadiyah

Setelah pihak pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri Agama) dan sejumlah pemuka agama Islam memberikan tawaran kepada Ahmadiyah agar menjadi agama

⁹ Lihat Michel Foucault, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, translated by Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978), hal. 21.

baru, tanggapan yang diberikan Ahmadiyah adalah menolak tawaran itu sebagaimana ditunjukkan dalam judul berita *Suara Merdeka* (edisi 17 Februari 2011). Memberikan status sebagai agama baru bagi Ahmadiyah, sebagaimana dapat dibaca pada bagian teras berita itu, merupakan solusi (pemecahan masalah). Dilihat dari sudut pembacaan adanya keterkaitan antara judul berita dengan teras berita, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Ahmadiyah tidak menerima solusi tersebut.

6. *Suara Merdeka* edisi 17 Februari 2011

Judul berita	Ahmadiyah Tolak Jadi Agama Baru
Subjudul	DPR Bentuk Panitia Kerja
Teras berita	Solusi yang ditawarkan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun para tokoh Islam, agar Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru ditolak para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia Abdul Basit: <ul style="list-style-type: none"> • “Ada desakan kepada Jemaat Ahmadiyah agar menjadi sebuah agama. Macam mana kami buat agama baru, para pendirinya saja berkiblat kepada Islam. Kami juga berpegang teguh kepada Alquran, sunah dan hadits.” • “Kenabian apa yang didakwakan oleh Mirza Ghulam Ahmad, dari segi apa kenabian ini? Itu semata-mata hanya tuduhan terhadap dia. Yang benar, beliau turun untuk meneruskan syariat nabi atau rasul, bukan nabi setelah nabi Muhammad.” • “Katanya keberadaan Ahmadiyah selalu meresahkan masyarakat. Padahal, kenyataannya kita yang selalu diserang.” • “Selama perjalanannya hingga sekarang, Jemaat Ahmadiyah ikut andil dalam sosial kemasyarakatan, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti Raden Muhammad Muhidin yang menjadi panitia pertama kemerdekaan RI. Pencipta lagu Indonesia Raya itu pun seorang Ahmadiyah.” ✓ Jazuli Juwaini, anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS: <ul style="list-style-type: none"> • Tawaran dari beberapa pemuka agama agar Ahmadiyah menjadi agama baru semata-mata untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi kekerasan. • “Pada prinsipnya, ada ajaran-ajaran Ahmadiyah yang tidak sama dengan agama Islam. Di sinilah permasalahannya mengapa umat Islam tidak menerima kehadiran Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam.” • Pemerintah tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, jika memang ajarannya sama dengan Islam. • Terkait jasa Ahmadiyah terhadap kemerdekaan RI, hal itu bukanlah substansi. ✓ Imran Muchtar, anggota komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat: <ul style="list-style-type: none"> • Banyak pihak yang telah melakukan kajian atas ajaran Ahmadiyah, di mana terdapat banyak perbedaan dengan ajaran Islam. ✓ Anggota Komisi VIII Hasrul Azwardari dari Fraksi PPP: <ul style="list-style-type: none"> • “Saya sepakat kita bentuk Panja Ahmadiyah karena akan sangat panjang untuk membahas masalah Ahmadiyah.” ✓ Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mengapresiasi berbagai saran dan masukan untuk penyelesaian masalah bangsa saat ini, termasuk saran soal kasus Ahmadiyah dan kerukunan umat beragama. • Terkait permintaan pembubaran ormas, hal tersebut merupakan masukan. ✓ Habib Rizieq:

	<ul style="list-style-type: none"> • Pihaknya siap mengamankan SKB tiga Menteri terkait Ahmadiyah, dan meminta aparat pemerintah konsisten untuk menindak pihak yang melanggar aturan tersebut. ✓ Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Fajar Riza Ul Haq: • Merebaknya kasus-kasus kekerasan yang sebagiannya terpublikasi luas memperlihatkan "sisi gelap" pluralisme keberagamaan yang diakibatkan kegagalan negara mengelola kemajemukan sekaligus melindungi warga negara. • Kerawanan kekerasan dan konflik horizontal di tingkat masyarakat rentan dijadikan komoditas politik. • Masyarakat harus mengontrol pemerintah dan mengawasi kinerja aparat kepolisian, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.
Peristiwa utama	Rapat dengar pendapat Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Rabu (16/2/2011) malam.
Konsekuensi	Penolakan JAI terhadap usulan agar Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengikut Ahmadiyah menyatakan menolak jika Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru. • Ahmadiyah dianggap berbeda dengan ajaran Islam. • FPI siap mengamankan SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah. • Negara gagal mengelola kemajemukan dan melindungi warganya.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Penolakan pihak Ahmadiyah itu didasarkan pada alasan kuat bahwa selama ini mereka telah menjalankan dan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan dalam agama Islam, yakni Al Quran, sunnah, dan hadits. Selain itu, penolakan itu dilandaskan pada alasan bahwa selama ini sebenarnya mereka tidak pernah membuat keresahan, justru merekalah yang diserang. Alasan lainnya adalah para pengikut Ahmadiyah telah memberi kontribusi dalam urusan kemasyarakatan, dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Alasan-alasan semacam itu lantas disanggah oleh kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bagi para wakil rakyat, Ahmadiyah tetap dianggap menyimpang karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan agama Islam (dominan) yang terdapat di Indonesia. Sementara itu, berkaitan dengan sumbangan yang telah diberikan beberapa pengikut Ahmadiyah dalam urusan sosial, justru dianggap tidak memiliki substansi apa pun dengan ketersesatan yang dilakukan Ahmadiyah.

Ditinjau dari aspek semantik, maka tawaran untuk menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru berkedudukan sebagai alat atau perkakas (*instrument*). Sedangkan pihak yang mempunyai persepsi, perasaan, atau menyatakan keadaan tertentu, disebut sebagai *experiencer* (pihak yang mengalami).¹⁰ Dalam kaitan ini dapat dilihat bahwa

¹⁰ Lihat Yule, *op. cit.*, hal. 103.

Ahmadiyah sebagai pihak yang (akan) mengalami atau berstatus sebagai agama baru tidak sudi menerima instrumen (opsi) untuk memecahkan masalah tersebut. Padahal, seperti pernyataan yang dikemukakan seorang wakil rakyat, “tawaran dari beberapa pemuka agama agar Ahmadiyah menjadi agama baru semata-mata untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi kekerasan”. Pernyataan itu memunculkan tudingan yang memberikan implikasi¹¹ bahwa jika Ahmadiyah menolak sebagai agama baru, maka dengan sendirinya Ahmadiyah harus bersiap-siap untuk mendapatkan kekerasan lagi. Lagi pula, jika kekerasan itu terjadi lagi, maka pihak yang bersalah bukanlah aktor-aktor yang melakukan kekerasan, melainkan pihak Ahmadiyah sendiri yang tidak sudi menerima status sebagai agama baru.

7. *Suara Merdeka* edisi 18 Februari 2011

Judul berita	DPR Siapkan RUU Ahmadiyah
Subjudul	MUI: Perbedaan Akidah Tak Bisa Ditoleransi
Teras berita	Komisi VIII DPR tengah mempertimbangkan membuat sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengatur agar Ahmadiyah dijadikan sebagai aliran kepercayaan.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hasrul Azwar, anggota Komisi VIII: • ”RUU ini untuk mengantisipasi jika mereka tetap bersikeras tidak menjadi agama sendiri.” • ”Intinya, kita berusaha menyelesaikan konflik Ahmadiyah agar semua umat beragama dapat berdampingan dengan damai.” ✓ Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding: • ”RUU itu bisa disusun berdasarkan poin-poin dari SKB dan hasil dialog yang masih akan terus kami lakukan.” • Komisi VIII tidak akan mempertimbangkan untuk melakukan pengucilan jemaat Ahmadiyah di sebuah pulau terpencil. ✓ HM Busro, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar: • ”Kita kan punya banyak pulau kosong, tinggal saja di sebuah pulau, jadi nggak ribut. Ini salah satu jalan keluar. Indonesia punya 17 ribu pulau dan masih banyak yang kosong.” • Pemisahan dengan warga non-Ahmadiyah bisa meredam konflik yang terjadi. • Mendapat informasi bahwa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik tetap melakukan penyebaran ajarannya tersebut meski dilarang oleh SKB. • ”Kita kemarin dari Cikeusik, kami tanya sama warga, ternyata bapak-bapak masih mengadakan dakwah ke tetangga. Bahkan, Ismail Suparman mendapat sokongan dana Rp 10 juta dari Ahmadiyah?” ✓ Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Abdul Basit: • Tidak ada jemaat Ahmadiyah yang melanggar SKB 3 Menteri. • ”Apalagi soal jemaat kami dibayar, itu tidak ada. Kami tidak pernah membayar jemaat.” ✓ Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding: • Pihaknya masih terus mencari solusi terbaik bagi persoalan Ahmadiyah. • Komisi VIII sama sekali tidak pernah memiliki pertimbangan untuk

¹¹ Dalam komunikasi sehari-hari, sebuah informasi yang berarti (benar) lebih dikatakan secara terselubung oleh sang pembicara daripada dikatakan secara tegas. Lihat Richards dan Schmidt, *op. cit.*, hal. 273.

	<p>melakukan pengucilan terhadap Ahmadiyah, termasuk membawa mereka ke pulau terpencil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketua MUI Ma'ruf Amin: <ul style="list-style-type: none"> • "Tidak hanya MUI, tapi forum ulama sedunia, dan forum ulama organisasi negara Islam (OKI) juga menganggap Ahmadiyah sesat." • "Kalau perbedaannya di akidah, maka itu menyimpang, dan tidak bisa ditoleransi. Ahmadiyah itu menyimpang makanya dianggap sesat." • "Dalam UU Penodaan Agama jelas diatur, bila penodaan dilakukan oleh orang pribadi maka dihentikan dengan SKB. Tapi, kalau dilakukan oleh organisasi maka harus dibubarkan." • Pembubaran tersebut bisa dilakukan oleh presiden, sesuai ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama. ✓ Komisioner Komnas HAM Nurkholis: <ul style="list-style-type: none"> • Usulan pengucilan Ahmadiyah melanggar azas kebhinekaan. ✓ Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak setuju dengan usulan pengucilan jemaat Ahmadiyah. • Pemerintah saat ini cukup fokus pada SKB 3 menteri yang telah dikeluarkan pada 2008. ✓ Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK): <ul style="list-style-type: none"> • Usulan pengucilan sebagai gagasan yang terlalu emosional. • "Sudah ada aturannya di SKB 3 menteri, dilaksanakan saja. Kemudian ketentuan hukum yang mengatur soal seperti itu, pembunuhan, penganiayaan, semua ada aturan hukumnya." ✓ Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia Abdul Basit: <ul style="list-style-type: none"> • "Tidak ada pihak manapun yang dapat memaksakan sebuah keyakinan. Ada desakan kepada Ahmadiyah agar menjadi sebuah agama. Macam mana kami buat agama baru, para pendirinya saja berkiblat kepada Islam. Kami juga berpegang teguh kepada Alquran, sunah dan hadits." ✓ Peneliti The Wahid Institute, Dr Rumadi: <ul style="list-style-type: none"> • "Saya bisa memahami penolakan Ahmadiyah. Dari dulu mereka juga bersikap seperti itu." • "Kalau Ahmadiyah dibubarkan, maka pertanyaan saya yang dibubarkan organisasinya atau keyakinannya?" ✓ Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath: <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah seharusnya langsung menindak pengikut Ahmadiyah begitu mereka tetap beraktifitas menyebarkan ajaran atau fahamnya, yang berarti melanggar SKB 3 menteri. ✓ Mantan Gubernur Lemhanas Prof Muladi: <ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan jemaah Ahmadiyah di Indonesia harus segera diselesaikan, karena sudah menimbulkan dampak di masyarakat. Salah satu upaya penyelesaian adalah menyatakan aliran tersebut bukan termasuk dalam Islam.
Peristiwa utama	Rapat dengar pendapat Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Rabu (16/2/2011) malam.
Konsekuensi	Penolakan JAI terhadap usulan agar Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengatur agar Ahmadiyah dijadikan sebagai aliran kepercayaan. • Menolak usulan pengucilan pengikut Ahmadiyah di sebuah pulau tertentu. • Ahmadiyah dijadikan agama baru sebagai solusi, namun pihak Jemaah Ahmadiyah tetap menolak usulan itu.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Menanggapi pernyataan dari pihak Ahmadiyah yang menyatakan penolakan untuk ditetapkan sebagai agama baru, maka selanjutnya pihak DPR akan menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur agar Ahmadiyah berstatus sebagai aliran kepercayaan. Dalam perspektif semantik, DPR berkedudukan sebagai agen (pelaku), entitas yang (akan) menjalankan suatu tindakan tertentu, sementara itu RUU berkedudukan sebagai tema, entitas yang dilibatkan atau dipengaruhi oleh aksi atau tindakan tersebut.¹² Apabila RUU dimaksudkan sebagai antisipasi, yang berarti melihat apa yang akan terjadi pada masa depan dan mengambil tindakan persiapan untuk mengatasinya,¹³ maka dapat dimaknai bahwa Ahmadiyah memang dianggap bersikeras untuk menolak statusnya sebagai agama baru. Namun, kebijakan membuat RUU untuk menjadikan Ahmadiyah sebagai kepercayaan (dan bukan agama) adalah sebetulnya upaya untuk mendegradasi status keyakinan Ahmadiyah itu sendiri. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam pemahaman umum masyarakat, aliran kepercayaan dianggap lebih rendah kedudukannya daripada agama. Sehingga, pembuatan RUU itu dapat dilihat sebagai upaya untuk menjadikan Ahmadiyah mengalami diskriminasi secara institusional (kelembagaan).¹⁴ Jika RUU ini nantinya akan diterapkan sebagai undang-undang, maka secara hukum pihak Ahmadiyah tidak lagi mampu mengklaim sebagai agama (Islam).

Persoalan menarik lainnya yang pantas dibahas dari isi berita tersebut adalah munculnya usulan yang dikemukakan salah satu wakil rakyat, yakni supaya kalangan pengikut Ahmadiyah ditempatkan di sebuah pulau tertentu. Hal ini dimaksudkan agar konflik antara pengikut Ahmadiyah dengan warga bukan Ahmadiyah dapat dicegah. Usulan tersebut makin menunjukkan bahwa Ahmadiyah berposisi sebagai kelompok minoritas yang harus dipisahkan dari kelompok mayoritas. Dalam relasi mayoritas-minoritas, salah satu bentuk penolakan yang biasa dijalankan oleh pihak mayoritas adalah dengan menjalankan segregasi (pemisahan secara spasial dan sosial antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas). Sementara itu, ketika para pengikut Ahmadiyah menolak ditetapkan statusnya sebagai agama baru, maka dapat dilihat

¹² Lihat Yule, *loc. cit.*, hal. 102.

¹³ Sally Wehmeier (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, 7th Edition (Oxford: Oxford University Press, 2010), hal. 56.

¹⁴ Diskriminasi secara institusional (*institutional discrimination*) dapat diartikan sebagai praktik-praktik yang dijalankan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang memiliki dampak merugikan bagi kelompok-kelompok subordinat. Lihat Diana Kendall, *Sociology in Our Times*, Eight Edition (Belmont: Wadsworth, 2011), hal. 319.

bahwa Ahmadiyah menghendaki terjadinya integrasi (penyatuan) dengan kalangan Islam dominan. Dalam kaitan ini, integrasi dapat dilihat sebagai reaksi minoritas untuk menolak statusnya sebagai pihak yang berada dalam kedudukan inferior, terpisah, dan menghendaki tercapainya kesederajatan dengan kelompok dominan.¹⁵

Hanya saja, apa yang dikehendaki Ahmadiyah untuk dianggap sebagai agama Islam dan berposisi sederajat dengan kelompok-kelompok Islam lainnya sulit untuk diwujudkan. Realitas ini dapat disimak pada bagian subjudul berita di atas yang mengutip pernyataan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa perbedaan akidah yang terdapat pada Ahmadiyah dengan ajaran Islam (dominan) tidak bisa ditoleransi. Pengertian toleransi itu sendiri adalah “penyimpangan yang diperbolehkan terhadap sebuah standar”.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ketika keberadaan Ahmadiyah dengan alasan akidah agama tidak dapat ditoleransi, maka kelompok ini memang dipandang telah keluar terlalu jauh dari standar keagamaan yang semestinya.

8. *Suara Merdeka* edisi 19 Februari 2011

Judul berita	Agama Harus Jadi Landasan Damai
Subjudul	
Teras berita	Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi menyatakan sesat atau tidaknya Ahmadiyah bukan manusia yang menentukan. “Sesat atau tidak, yang paling tahu itu adalah Allah,” ujar Masdar saat rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dengan para pemuka Agama di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2) dini hari.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi: <ul style="list-style-type: none"> • Agama harus dijadikan landasan untuk kehidupan yang lebih damai. • “Kerukunan adalah tanggung jawab pemimpin umat beragama. Yang menentukan wajah umatnya adalah pemimpinnya.” • “Kekerasan atas nama agama, saya kira layak diberi hukuman dua kali lipat, yaitu untuk kezaliman dan atas penodaan agama yang diklaimnya.” ✓ Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf: <ul style="list-style-type: none"> • “Umat Islam itu kembali kepada basis pemahaman makna Islam yang intinya adalah damai. Penyelesaian harus damai tidak mendahulukan kekerasan.” • Kerusuhan massa di sejumlah daerah karena ulah provokator. ✓ Ketua F-PPP, Hasrul Azwar: <ul style="list-style-type: none"> • Pembubaran Ahmadiyah tidak memerlukan putusan pengadilan karena Ahmadiyah bukan sebuah ormas namun hanya sebuah ajaran. • Pembubaran Ahmadiyah dapat dilakukan karena mereka telah melanggar UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.
Peristiwa utama	Rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dengan para pemuka Agama di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/2) dini hari.
Konsekuensi	Bergulir pernyataan bahwa agama harus menjadi landasan perdamaian dan

¹⁵ Alex Thio, *Sociology: An Introduction, Second Edition* (Sydney: Harper and Row Publishers, 1989).

¹⁶ Frederick C. Mish (ed.), *The Merriam-Webster Dictionary* (Springfield: Merriam Webster Incorporated, 2004), hal. 751.

	kerukunan.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Agama harus dijadikan sebagai landasan damai, bukan untuk menciptakan kekerasan. • Pelaku kekerasan atas nama agama harus dihukum lebih berat. • Ahmadiyah harus dibubarkan karena dianggap telah menodai ajaran Islam.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Pada saat banyak pihak, terutama dari kalangan yang memiliki otoritas dalam kehidupan agama Islam, seperti MUI, NU, dan menteri agama, menuding Ahmadiyah sebagai kelompok yang sesat, justru pembelaan muncul dari Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi yang menyatakan bahwa sesat atau tidaknya Ahmadiyah bukanlah manusia yang menentukan, sebagaimana terdapat dalam teras berita di atas (*Suara Merdeka* edisi 19 Februari 2011). “Sesat atau tidak, yang paling tahu itu adalah Allah,” ujarnya. Pernyataan tersebut terasa bertentangan dengan pernyataan yang diberikan para tokoh NU lainnya. Pernyataan yang dikemukakan Masdar Farid Mas'udi itu lebih mirip dengan aliran teisme yang dikemukakan filosof Immanuel Kant, yang menegaskan bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau keabadian, namun kita harus puas dengan iman.¹⁷

Dilihat dari kebanyakan ulama dan pernyataan para tokoh agama Islam lain yang cenderung memojokkan Ahmadiyah, maka pandangan Masdar tersebut terasa sangat radikal. Terlebih lagi dalam judul berita itu dinyatakan “Agama Harus Jadi Landasan Damai”. Jika dibaca dengan menggunakan analisis wacana, maka terdapat implikatur bahwa selama ini agama tidak pernah menjadi landasan damai. Artinya adalah idealnya agama menjadi basis perdamaian, namun pada kenyataannya justru agama menjadi tameng pembenar bagi tindak kekerasan. Lebih dari itu, Masdar juga mengemukakan bahwa para pelaku kekerasan atas nama agama harus dihukum dua kali lebih berat. Pertama, untuk watak kezaliman yang telah mereka lakukan. Kedua, untuk penodaan terhadap agama yang telah diklaimnya tersebut. Di sini Masdar justru memberikan sindiran bahwa para pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah justru lebih pantas disebut sebagai pihak yang sesat.

¹⁷ Pernyataan Kant tersebut dipertentangkan dengan paham agnotisisme yang dikemukakan Thomas Henry Huxley pada tahun 1869. Agnotisisme sendiri berasal dari kata “a” yang berarti tidak dan “gnastos” yang bermakna mengetahui. Sikap filosofis dan religius itu hendak menegaskan bahwa gagasan-gagasan metafisik tidak pernah dapat dibuktikan maupun bisa terbukti. Lihat Robert Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal. 15.

9. *Suara Merdeka* edisi 21 Februari 2011

Judul berita	MUI Tuntut Ahmadiyah Segera Dibubarkan
Subjudul	
Teras berita	Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar segera membubarkan Ahmadiyah melalui keputusan presiden. Pasalnya, ketidaktegasan pemerintah menjadikan umat Islam tidak sabar sehingga memunculkan sikap main hakim sendiri dengan sasaran para pengikut Ahmadiyah.
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketua MUI KH Umar Shihab: <ul style="list-style-type: none"> • ”Sikap umat tersebut beralasan, karena melihat Ahmadiyah masih dengan leluasa menyiarkan keyakinannya, padahal hampir semua organisasi keagamaan termasuk MUI sudah tegas menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw, adalah sesat dan menyesatkan.” • Pembubaran Ahmadiyah merupakan penyelesaian terbaik untuk menghindari gejolak yang terus-menerus. • Upaya pembinaan tak mungkin dilakukan karena Ahmadiyah terbukti sesat, apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwa sejak lama. • Peraturan perundangan juga telah tegas mengatur pelarangan Ahmadiyah, yakni melalui Surat Keputusan Bersama dan UU Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. • Pemerintah terutama pemerintah daerah kurang memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai media mendeteksi dini dan mencari jalan keluar permasalahan lintas agama yang muncul. ✓ Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo: <ul style="list-style-type: none"> • MUI mengoptimalkan perannya mencegah konflik beragama, serta memperkuat benteng umat agar tak mudah terpancing provokasi pihak lain.
Peristiwa utama	Musyarawah Daerah VIII MUI Jateng di Hotel Semesta Semarang.
Konsekuensi	Adanya usulan agar Ahmadiyah dibubarkan untuk mengatasi gejolak yang terus-menerus muncul dalam masyarakat.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan terhadap para pengikut Ahmadiyah merupakan akibat ketidaktegasan pemerintah yang tidak segera membubarkan Ahmadiyah. • Sejak lama MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat. • Pembubaran Ahmadiyah merupakan penyelesaian terbaik karena telah sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

Desakan untuk membubarkan Ahmadiyah tetap menjadi pilihan kata dalam judul berita yang dipilih *Suara Merdeka*, sebagaimana dapat disimak pada *headline* yang ditampilkan *Suara Merdeka* (edisi 21 Februari 2011), yang menyatakan: “MUI Tuntut Ahmadiyah Segera Dibubarkan”. Dalam hal ini, pihak yang dituntut oleh MUI adalah pemerintah, sebagaimana bisa dibaca pada bagian teras berita. Dalam penilaian MUI, pihak Ahmadiyah telah melakukan kesesatan karena mengakui keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad. Selain itu, menurut MUI, pembubaran Ahmadiyah adalah penyelesaian terbaik untuk menghindari gejolak yang terjadi secara kontinyu.

Apabila ditinjau dari pola kalimat yang disajikan pada judul berita itu, posisi MUI adalah sebagai subyek, yakni pihak yang memiliki peran menonjol atau menjadi

agen dalam suatu tindakan tertentu.¹⁸ Keberanian yang ditunjukkan MUI itu menjadi beralasan karena lembaga ini yang memiliki kewenangan untuk menentukan tentang sesat atau tidaknya suatu ajaran agama dalam domain Islam. Hal itu bisa dilacak pula pada struktur kalimat yang menunjukkan unsur semantik agen dan tema.¹⁹ Maksudnya adalah MUI berkedudukan sebagai agen, entitas yang (akan) menampilkan tindakan. Sementara itu, Ahmadiyah berkedudukan sebagai tema, entitas yang terlibat atau dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Dengan rumusan lain, MUI menjadi subyek yang mendesak pembubaran, sedangkan Ahmadiyah sebagai obyek yang dibubarkan.

10. *Suara Merdeka* edisi 26 Februari 2011

Judul berita	Pimpinan Ahmadiyah Akan Diperiksa
Subjudul	Terkait Kasus Cikeusik, Banten
Teras berita	Polisi akan memeriksa pimpinan Jema'at Ahmadiyah Indonesia sebagai saksi terkait kerusuhan atau penyerangan sekelompok massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Namun, polisi belum menyebutkan siapa pimpinan Ahmadiyah yang dimaksud. "Nanti pada gilirannya akan ada keterangan saksi dari pimpinan Ahmadiyah," jelas Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jumat (25/2).
Reaksi-reaksi verbal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Boy Rafli Amar: • Polisi belum bisa memeriksa salah satu jema'at Ahmadiyah, Deden, karena kesehatannya belum pulih, kendati yang bersangkutan telah keluar dari rumah sakit dua pekan lalu. • Pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait penanganan kasus Cikeusik. ✓ Koordinator API (Aliansi Pergerakan Islam) Jabar, Asep Syarifuddin: • "Jika sampai tanggal 1 Maret 2011, SBY tidak juga mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah, massa kami akan menduduki Istana Presiden." • "Apabila tidak merespons aspirasi umat, lebih baik SBY mundur."
Peristiwa utama	Bentrokan antara warga dengan anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.
Konsekuensi	Munculnya korban tewas dan luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Komentar-komentar	<ul style="list-style-type: none"> • Polisi akan memeriksa pimpinan Jemaat Ahmadiyah sebagai saksi. • Polisi telah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap para pengikut Ahmadiyah. • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk segera membubarkan Ahmadiyah.
Latar belakang	Penyerbuan sekelompok orang terhadap pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik.

¹⁸ Lihat Hadumod Bussmann, *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, translated and edited by Gregory Trauth dan Kerzti Kazzazi (London dan New York: Routledge, 1996), hal 1138.

¹⁹ Lihat Yule, *loc. cit.*, hal. 102.

Setelah hampir tiga minggu peristiwa penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah terjadi, pihak kepolisian menyatakan bahwa “Pimpinan Ahmadiyah akan Diperiksa” sebagaimana dapat dibaca pada judul berita *Suara Merdeka* (edisi 26 Februari 2011). Hanya saja kalimat yang dijadikan judul berita itu berstruktur pasif tanpa menunjukkan siapa atau pihak mana yang menjadi subyeknya. Namun, kalau dibaca pada bagian teras beritanya akan diketahui bahwa pihak yang akan melakukan pemeriksaan adalah kepolisian. Jika kalimat itu disusun dalam struktur aktif, maka akan berbunyi “pihak kepolisian akan memeriksa pimpinan Jemaat Ahmadiyah”. Di sini, sebenarnya, dalam tinjauan semantik pihak kepolisian berposisi sebagai agen, sedangkan pimpinan Jemaat Ahmadiyah berkedudukan sebagai tema.²⁰

Kedudukan Ahmadiyah sebagai tema, yakni pihak yang akan dilibatkan atau dipengaruhi oleh pihak kepolisian, sengaja lebih ditonjolkan dalam judul berita. Hal ini disebabkan bahwa peristiwa tersebut memang menempatkan Ahmadiyah sebagai pihak yang paling menonjol dalam kasus kekerasan di Cikeusik, Pandeglang, Banten tersebut. Atau, susunan kalimat itu bisa juga dibaca bahwa pihak Ahmadiyah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Persoalan pilihan kata lain yang juga menarik dibahas adalah pemakaian kata “pemeriksaan” daripada “interogasi”, misalnya. Pada situasi demikian, *Suara Merdeka* sengaja menjalankan eufemisme,²¹ supaya terkesan bahwa pemeriksaan yang akan dijalani pimpinan Jemaat Ahmadiyah akan berjalan secara manusiawi. Sebabnya adalah makna interogasi selama ini dimengerti sebagai teknik bertanya polisi kepada pihak yang ditetapkan sebagai saksi atau pun tersangka dengan penggunaan cara-cara kekerasan.

²⁰ *Ibid.*, hal. 102.

²¹ Eufemisme dapat diartikan sebagai penggunaan kata yang terasa menyenangkan untuk menggantikan kata yang menimbulkan keberatan karena dianggap memiliki konotasi yang peyoratif (kurang baik). Lihat Bussmann, *op.cit.*, hal. 387-388.

BAB III

STRUKTUR WACANA IDEOLOGIS

AHMADIYAH SEBAGAI AJARAN KELOMPOK YANG SESAT

Setelah skema pemberitaan tentang kasus penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang dimuat *Suara Merdeka* diuraikan secara detail pada Bab II, maka pada Bab III ini diuraikan tentang struktur wacana ideologis yang terdapat di dalamnya. Berita-berita yang memuat rangkaian kejadian tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai pemaparan peristiwa sosial, namun hal yang lebih substansial ialah berita-berita tersebut dianggap sebagai mekanisme untuk mengungkapkan gagasan-gagasan ideologis yang dominan atau sedang mendominasi.

Apabila berita-berita itu diperlakukan bukan sekadar uraian tentang peristiwa sosial yang menampilkan kejadian tentang penyerangan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah, maka berita-berita itu berkedudukan sebagai wacana (*discourse*). Apa yang disebut sebagai wacana dalam kaitan ini adalah “bahasa yang sedang digunakan, bahasa yang berada di atas atau melampaui kalimat, bahasa sebagai makna dalam interaksi, dan bahasa dalam konteks situasional dan kultural”.¹ Secara keseluruhan, berita-berita tersebut pada dasarnya hendak menegaskan pemikiran ideologis tertentu. Sementara itu, ideologi dalam domain ini dimengerti sebagai keyakinan-keyakinan sosial. Hal yang terdapat dalam ideologi adalah berbagai jenis gagasan spesifik. Ideologi, dengan demikian, bukanlah keyakinan personal, melainkan keyakinan yang tersebar dalam kelompok-kelompok, pengetahuan yang bersifat sosiokultural, sikap-sikap atau pun norma-norma dan nilai-nilai kelompok. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa ideologi membentuk basis sistem keyakinan atau representasi-representasi sosial kelompok-kelompok tertentu.²

Ideologi yang terdapat dalam berita-berita yang dimuat *Suara Merdeka* pada intinya hendak mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat. Hal ini dapat dilacak dengan menyimak secara cermat skema pemberitaan yang di dalamnya secara eksplisit lebih dominan menampilkan pihak-pihak yang menentang eksistensi

¹ Lihat Hugh Trappes-Lomax, “Discourse Analysis”, dalam Alan Davies dan Chatherine Elder (eds.), *The Handbook of Applied Linguistics* (Malden, Blackwell Publishing, 2004), hal. 134.

² Teun A. van Dijk, “Discourse, Ideology, and Context”, *Folia Linguistica*, XXX/1-2, 2001, hal. 11-40.

Ahmadiyah. Sementara itu, pihak Ahmadiyah dan beberapa kelompok yang berupaya memberikan pembelaan terhadap keberadaannya ditampilkan sangat sedikit atau pun implisit. Dalam kaitan permasalahan ini sumber-sumber berita resmi, seperti Menteri Agama (pemerintah), kalangan tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih banyak mendapatkan akses. Sebaliknya, pihak Ahmadiyah dan kelompok-kelompok yang mendukungnya diberikan akses yang sangat terbatas.

Bagaimana Ahmadiyah secara ideologis dipandang sebagai ajaran kelompok yang sesat? Teun A. van Dijk menyajikan strategi general analisis ideologi yang berisi struktur-struktur seperti berikut ini:³

A. Keanggotaan: Siapakah kami?

Dalam skema pemberitaan dapat dilihat secara nyata siapa saja atau pun pihak mana saja yang dijadikan narasumber-narasumber berita. Apabila dibuat garis batas (demarkasi) yang jelas, maka terdapat dua pihak yang berada dalam kedudukan yang saling beroposisi. Pertama, pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama Suryadharma Ali), para tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), para tokoh Nahdlatul Ulama (NU), tokoh Front Pembela Islam (FPI), para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tokoh Forum Umat Islam Indonesia (FUI), dan Aliansi Pergerakan Islam (API). Kedua, para tokoh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), peneliti The Wahid Institute, dan Ketua Badan Setara Institute

B. Aktivitas-aktivitas: Apa yang kami lakukan?

Masing-masing pihak mengemukakan pernyataan tentang beberapa hal yang telah dan akan mereka lakukan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: Pihak pertama, terdiri dari: (1) pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, menawarkan solusi penyelesaian kasus Ahmadiyah dengan menghadirkan empat pilihan, yakni Ahmadiyah menjadi agama yang sama sekali baru di luar Islam; Ahmadiyah kembali masuk ke dalam ajaran Islam yang dominan; Ahmadiyah dibiarkan berkembang karena dianggap sebagai realisasi dari hak asasi manusia; dan, Ahmadiyah dilarang atau dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan agama Islam yang dianut

³ Lihat Teun A. van Dijk, *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction* (Barcelona: Ariel, 2003), hal. 43.

kalangan muslim yang lain. Selain itu, Menteri Agama juga mengatakan akan mengadakan dialog untuk menyelesaikan kasus ini.

(2) kalangan tokoh ulama NU yang menyatakan bahwa sudah sekian lama mereka berupaya untuk menyadarkan para pengikut Ahmadiyah supaya kembali pada ajaran Islam yang benar; (3) para tokoh MUI yang mendesak pemerintah agar segera membubarkan Ahmadiyah karena ajaran dari kelompok ini dianggap sesat; (4) tokoh FPI (5) FUI, dan (6) aktivis API yang juga menyatakan desakannya agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, segera melakukan pembubaran Ahmadiyah; serta, (7) anggota DPR yang mengemukakan usulan agar para pengikut Ahmadiyah ditempatkan dalam sebuah pulau tertentu dan mereka juga berencana membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadikan Ahmadiyah berstatus sebagai aliran kepercayaan dan bukan bagian dari agama Islam.

Pihak kedua, yang terdiri dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang menyatakan bahwa mereka selama ini telah mengikuti ajaran Islam seperti kalangan umat muslim lain di Indonesia. Pihak lain yang berada dalam posisi ini adalah peneliti The Wahid Institute yang mengemukakan penolakannya jika Ahmadiyah dibubarkan.

C. Tujuan-tujuan: Mengapa kami melakukan hal ini?

Tujuan-tujuan yang dikemukakan pihak pertama dalam berbagai pernyataan mereka adalah memberi solusi terbaik agar persoalan Ahmadiyah cepat terselesaikan secara tuntas. Sehingga, berbagai aksi kekerasan yang selama ini menimpa kelompok keagamaan ini tidak terulang lagi. Sementara itu, pihak kedua menyatakan bahwa mereka selama ini mengikuti ajaran Ahmadiyah karena mereka merasa bahwa ajaran ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ada di Indonesia.

D. Norma-norma: Apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan?

Pihak pertama, dalam hal ini Menteri Agama, menyatakan bahwa dia boleh memberikan tawaran karena hal itu adalah wilayah kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu pihak-pihak lain yang berada di wilayah pertama menyatakan bahwa mereka boleh melakukan pembubaran terhadap Ahmadiyah karena kelompok ini dipandang telah melakukan kesesatan (tidak mengikuti ajaran Islam yang benar) dan telah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Sedangkan pada sisi yang berseberangan, pihak Ahmadiyah tidak memiliki kekuatan yang membolehkan.

Kelompok ini hanya menerima hal-hal yang tidak dibolehkan, seperti misalnya tidak boleh lagi mengikuti ajaran yang telah mereka yakini selama ini.

E. Relasi-relasi: Siapa sajakah teman atau musuh kami?

Memang, secara eksplisit tidak ditemukan bahwa kelompok-kelompok itu saling memiliki relasi pertemanan (aliansi) yang terbuka. Namun, dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan masing-masing pihak dapat diketahui bahwa kelompok pertama, yakni pemerintah, memiliki jalinan relasional dengan MUI dan NU. Dilihat dari kesamaan sikapnya, kelompok pertama ini juga mendapatkan dukungan dari FPI, API, dan FUI. Kelompok ini secara implisit juga mendapatkan dukungan dari para anggota DPR yang menyatakan akan membuat RUU untuk Ahmadiyah. Bahkan, kelompok ini dalam persamaan sikapnya, juga didukung oleh mantan Gubernur Lemhanas, Muladi.

Sementara itu, kelompok kedua, yakni Ahmadiyah, berada dalam kedudukan yang terkucil atau dieksklusikan. Beberapa pihak, terutama adalah kalangan yang mendukung kebebasan beragama dan realisasi hak asasi manusia, menyatakan secara terselubung dukungan mereka kepada Ahmadiyah.

F. Sumber-sumber: Apa yang kami miliki dan pihak lain tidak memilikinya?

Kelompok pertama, tentu saja, berada dalam posisi kekuasaan yang jauh lebih dominan. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa Menteri Agama memiliki sebuah kewenangan yang besar untuk meregulasikan kehidupan beragama di Indonesia. MUI menyatakan bahwa mereka merupakan wadah institusional bagi para ulama yang berada di Indonesia. Para ulama NU dapat juga mengemukakan klaim bahwa mereka merupakan anggota organisasi keagamaan paling besar di negara kita. Sedangkan kelompok-kelompok lain semacam FPI, FUI, dan juga API dapat mengklaim untuk melakukan pembubaran Ahmadiyah karena SKB Tiga Menteri masih diberlakukan.

Sementara itu, dalam kedudukan yang tidak sederajat, kelompok Ahmadiyah hanya bisa mengemukakan klaim normatif bahwa mereka selama ini telah mengikuti ajaran Islam seperti umat muslim lainnya. Para pengikut Ahmadiyah juga sekadar bisa menyatakan keluhan bahwa mereka selama ini menjadi korban penyerangan. Hal lain yang dapat dikemukakan pihak Ahmadiyah ialah beberapa anggotanya telah memberi kontribusi sosial bagi kehidupan bangsa ini.

BAB IV

PENUTUP

Pemberitaan tentang kasus penyerangan terhadap para pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang ditampilkan *Suara Merdeka* dalam perspektif analisis wacana tidak hanya dilihat sebagai deskripsi terhadap peristiwa itu sendiri. Pemberitaan itu lebih diperlakukan sebagai mekanisme pemaparan bagaimana *Suara Merdeka* menampilkan pihak-pihak tertentu memiliki gagasan atau keyakinan yang bersifat ideologis. Sehingga, berita bukan lagi dianggap sebagai problem teknis dalam praktik jurnalisme, melainkan sebagai mekanisme kemenangan ideologi dominan.

Ketika harian ini memberikan peluang atau akses yang jauh lebih besar kepada pihak-pihak dominan, seperti Menteri Agama Suryadharma Ali, kalangan tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), para pemuka Majelis Ulama Indonesia (MUI), para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan beberapa tokoh lainnya di luar struktur resmi pemerintah (seperti Front Pembela Islam, Aliansi Pergerakan Islam, Forum Umat Islam, dan beberapa pihak lain yang berposisi secara personal), yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah atau usulan Ahmadiyah ditetapkan statusnya sebagai agama yang sama sekali baru di luar Islam, maka posisi Ahmadiyah pun terkucilkan.

Demikian juga sebaliknya ketika pihak Ahmadiyah diberikan ruang atau akses yang demikian terbatas untuk mengemukakan pernyataan-pernyataannya, maka secara sistematis *Suara Merdeka* telah ikut serta melakukan eksklusi terhadap kelompok ini. Ahmadiyah diposisikan sebagai sekelompok minoritas yang layak untuk mendapatkan penghukuman (dalam wujud kekerasan) karena para penganut ajaran ini telah dinilai berada dalam kesesatan. Pembelaan yang diberikan oleh kalangan aktivis hak asasi manusia dan penganjur kebebasan beragama (berkeyakinan) pun diberikan ruang atau akses yang minimal. Dalam keadaan demikian, Ahmadiyah makin ditabalkan sebagai kelompok yang melakukan penyimpangan (*deviant*) dalam lingkup ajaran Islam.

Hal itu membuktikan bahwa masalah penyimpangan dalam ajaran keagamaan (Islam) ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas regulatif. Ironisnya, media massa (dalam hal ini *Suara Merdeka*) memberi akses yang jauh lebih besar terhadap pihak resmi ini. Dalam situasi demikian, media massa berkedudukan sebagai aparatus ideologis kelompok dominan yang memiliki klaim kebenaran ajaran (Islam) tertentu.

Daftar Pustaka

- Audi, Robert (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
- Bennett, Tony, "Media, 'Reality', Signification" dalam Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran dan Janet Woollacott (eds.), *Culture, Society, and the Media* (London dan New York: Routledge, 1986).
- Bussmann, Hadumod, *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, translated and edited by Gregory Trauth dan Kerztin Kazzazi (London dan New York: Routledge, 1996).
- Cohen, Stanley dan Jock Young (eds.), *The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass Media* (California: Sage Publications, 1981).
- Foss, Sonja K., Karen A. Foss, dan Robert Trapp, *Contemporary Perspective on Rhetoric* (Illinois: Waveland Press, 1985).
- Foucault, Michel, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, translated by Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978).
- _____, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980).
- Hall, Stuart, "The Work of Representation" dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (New Delhi: Sage Publications, 1997).
- Hartley, John, *Understanding News* (London dan New York: Routledge, 1989).
- Kendall, Diana, *Sociology in Our Times, Eight Edition* (Belmont: Wadsworth, 2011).
- McLaughlin, Eugene dan John Muncie (eds.), *The Sage Dictionary of Criminology* (New Delhi: Sage Publications, 2001).
- Meibauer, J., "Implicature" dalam Jacob L. Mey (ed.), *Concise Encyclopedia of Pragmatics, Second Edition* (Oxford: Elsevier, 2009).
- Mills, Sara, *Discourse* (London dan New York: Routledge, 1997).
- Mish, Frederick C. (ed.), *The Merriam-Webster Dictionary* (Springfield: Merriam Webster Incorporated, 2004).
- Richards, Jack C. dan Richard Schmidt, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, Fourth Edition* (London: Pearson, 2010).
- Schaefer, Richard T., *Sociology: Tenth Edition* (Toronto: McGraw Hill, 2007).
- Schmitt, Valdenise, Fransisco Antonio Pereira Fialho, dan Lucilia Panisset Travassos, "News Structure in the Press: A Study of the Applicability of the van Dijk Analysis", *The Fourth International Cyberspace Conference on Ergonomics, Johannesburg: International Ergonomics Association Press, 2005*.

- Stolley, Kathy S., *The Basics of Sociology* (London: Greenwood Press, 2005).
- Thio, Alex, *Sociology: An Introduction, Second Edition* (Sydney: Harper & Row Publishers, 1989).
- Trappes-Lomax, Hugh, "Discourse Analysis", dalam Alan Davies dan Chaterine Elder (eds.), *The Handbook of Applied Linguistics* (Malden, Blackwell Publishing, 2004).
- van Dijk, Teun A., *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction* (Barcelona: Ariel, 2003).
- _____, "Critical Discourse Analysis" dalam D. Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton (eds.), *Handbook of Discourse Analysis* (Oxford: Blackwell, 2001).
- _____, "Discourse, Ideology, and Context", *Folia Linguistica*, XXX/1-2, 2001, hal. 11-40.
- _____, "The Interdisciplinary Study of News Discourse" dalam Klaus Bruhn Jensen dan Nicholas W. Jankowski (eds.), *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research* (London dan New York: Routledge, 1993).
- Wehmeier, Sally (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 7th Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2010).
- Yule, George, *The Study of Language, Third Edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Zgourides, George D. dan Christie S. Zgourides, *Sociology* (New York: IDG Books Worldwide, 2000).

Berita

- "Demam Daerah Melarang Ahmadiyah", Majalah *Tempo* edisi 7 Maret 2011.
- "SBY: Petualangan Kebencian Tak Boleh Tumbuh Subur", *Seputar Indonesia* edisi 22 Maret 2011.
- "NU: Ahmadiyah Menyimpang, Tapi Tak Boleh Dikerasi", *Tempo Interaktif* edisi 27 Maret 2011, 14:44 WIB.
- "Ahmadiyah Diserang, Tiga Meninggal", *Koran Tempo* edisi 7 Februari 2011.
- "Kronologi Penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik", *Tempo Interaktif* edisi 6 Februari 2011, 16.45 WIB.
- "Seribuan Warga Cikeusik Serang Jamaah Ahmadiyah", *Kompas.com* edisi Minggu, 6 Februari 2011, 13.04 WIB.